



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANGKA
TENGAH

2024
TAHUN ANGGARAN



LKIP
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

DINAS
PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM



L K I P

**DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
TH. 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Perindagkop-UKM) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah yang mencakup capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah disusun berdasarkan pada PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Penyusunan LKJIP 2024 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta Akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan-nya.



Koba, 12 Maret 2025
KEPALA DINAS,

IRWANDI, S.STP., M.A.P.
PEMBINA TK. I / IV b
NIP. 19841106 200212 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja..... | 3 |
| C. Isu Strategis Perangkat Daerah..... | 4 |
| D. Landasan Hukum..... | 8 |
| E. Sistematika..... | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 11 |
| A. Rencana Strategis..... | 12 |
| B. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... | 19 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 21 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 25 |
| A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja..... | 26 |
| B. Capaian Kinerja Organisasi..... | 26 |
| C. Analisis Capaian Kinerja Dinas Perindagkop-UKM Tahun 2024..... | 27 |
| D. Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026..... | 40 |
| E. Analisis Faktor Pendorong/Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran..... | 41 |
| F. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 43 |
| BAB IV PENUTUP..... | 48 |
| LAMPIRAN | |
| Matriks Renstra | |
| SK Penetapan Indikator Kinerja Utama | |
| Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah | |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditargetkan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah pada tahun tersebut.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Perindagkop-UKM) merupakan unsur pelaksana otonomi di Kabupaten Bangka Tengah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai ruang lingkup tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

3. Struktur Organisasi

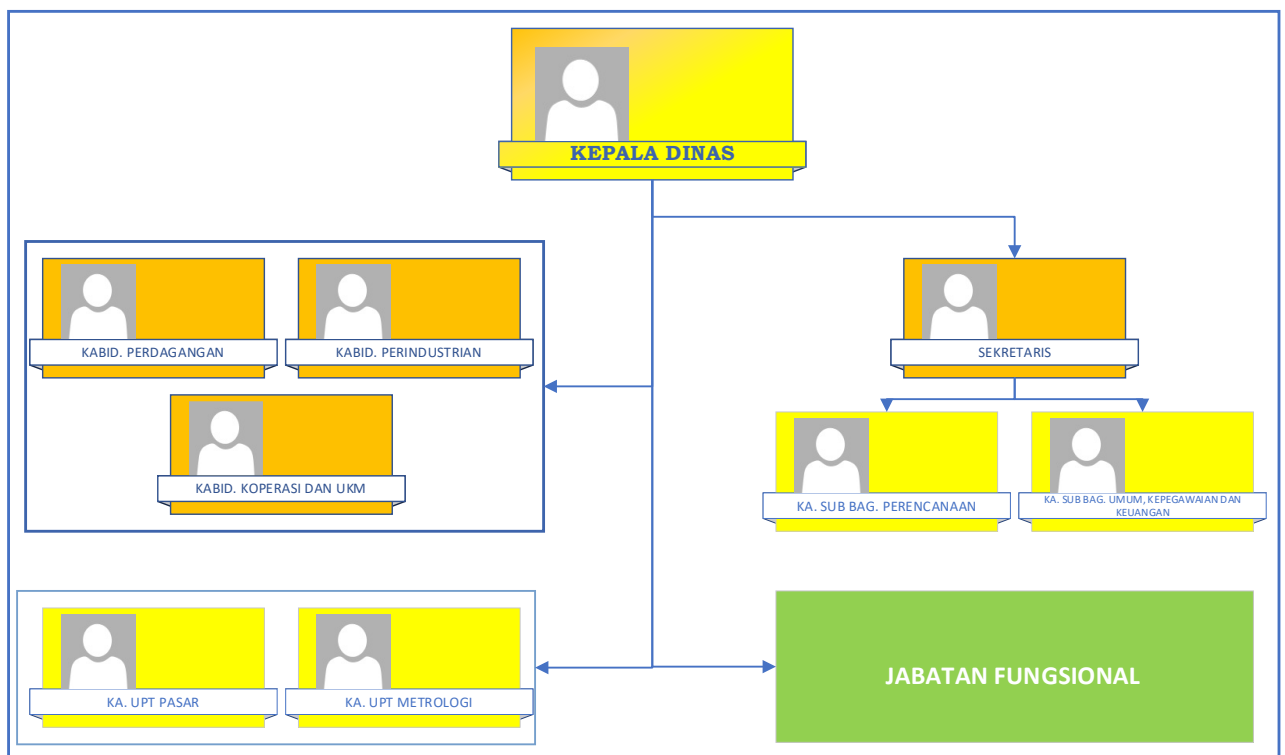
Struktur organisasi Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas:

- a) 1 (satu) Kepala Dinas;
- b) 1 (satu) Sekretariat;
- c) 3 (tiga) Bidang, yaitu: Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi dan UKM;

- d) 2 (dua) Sub Bagian, yaitu: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan;
- e) UPT Dinas; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar struktur organisasi Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud diatas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan dinamika perkembangan kondisi perekonomian dan bisnis UMKM terkini serta hasil pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah, visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, dan telaahan terhadap sasaran jangka menengah Renstra Dinas Provinsi dan KL, dapat diidentifikasi isu-isu strategis per bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2022 - 2026 sebagai berikut:

Bidang Koperasi, UMKM dan Industri Kecil

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, peluang dan tantangan pengembangan koperasi, UMKM dan industri kecil di Kabupaten Bangka Tengah, setidaknya ada 2 (dua) isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian, yaitu:

(1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM koperasi, UMKM, dan industri kecil menuju SDM yang *skillful*, inovatif, kreatif dan lebih tahan banting terhadap tantangan ekonomi dan bisnis.

Tidak dipungkiri bahwa ketersediaan SDM semakin hari semakin bertambah, namun hanya sedikit yang betul-betul mempunyai *skill*, pengetahuan, inovasi, dan kreativitas untuk menghadapi berbagai tantangan bisnis era ini. Khususnya SDM UMKM dan industri kecil di Kabupaten Bangka Tengah, dengan pendidikan rata-rata masyarakat setingkat SMP (7,19 tahun – BPS, 2021) dan demografi penduduk $\pm 80\%$ adalah masyarakat pedesaan, kesadaran untuk meningkatkan kapasitas diri sangat rendah.

Pelaku UMKM dengan karakteristik seperti ini, umumnya bergantung dengan Pemerintah untuk memberikan bantuan berupa peralatan produksi atau permodalan untuk pengembangan usahanya. Pelaku UMKM tidak menyadari bahwa diri mereka sebagai komponen utama bisnis mereka yang harus ditingkatkan levelnya. Pandemi COVID-19 telah menyuguhkan bukti bahwa SDM UMKM yang tangguh berhasil *survive*, bertumbuh bahkan mampu membesarkan usahanya, ketika yang lain terpuruk bahkan terpaksa menutup bisnis.

(2) Digitalisasi usaha bagi koperasi, UMKM dan industri kecil

Dimasa pandemi, UMKM maupun pelaku industri kecil yang telah mentransformasikan bisnisnya secara digital terbukti lebih mampu bertahan, bertumbuh, bahkan mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Di era digital saat ini, tidak ada pilihan bagi UMKM selain mentransformasikan bisnis dari konvensional menjadi digital. UMKM harus mampu memanfaatkan berbagai *platform e-commerce* yang ada untuk memperbesar peluang pasar dan bisnis.

Pandemi COVID-19 sudah berlalu. Namun pola hidup masyarakat yang sudah terlanjur terbentuk, khususnya berbelanja melalui *e-commerce* akan terus meningkat dari waktu ke

waktu. Pada akhirnya, *e-commerce* dan *platform-platform* digital lainnya akan memainkan peran yang sangat besar didalam dunia bisnis dan keuangan.

Bidang Perdagangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, peluang dan tantangan pengembangan bidang perdagangan di Kabupaten Bangka Tengah, 3 (tiga) isu strategis yang menjadi perhatian, yaitu:

(1) Stabilisasi harga bahan pokok

Bank Indonesia memberikan tiga alasan pentingnya kestabilan harga, sebagai berikut:

- a. Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin bertambah miskin.
- b. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Sebagai bagian dari daerah kepulauan, harga bahan pokok dan komoditi pertanian di Kabupaten Bangka Tengah rentan terjadi gejolak. Oleh sebab itu, kelancaran rantai pasok dan distribusi barang sangat penting. Terutama komoditi-komoditi pertanian yang diproduksi di Kabupaten Bangka Tengah, cabe dan bawang misalnya, apabila pasokan dari luar berkurang, maka harga eceran komoditi akan melambung tinggi. Jika masyarakat menilai harga akan naik, maka akan terjadi pembelian secara besar-besaran (*panic buying*) yang berakhir dengan kelangkaan barang. Sebaliknya, apabila pasokan barang dari luar berlebihan, dipastikan harga akan jeblok yang berpotensi merugikan petani.

Dalam menjaga kestabilan harga harus dilakukan secara sinergis dan harmonis oleh pemerintah dan masyarakat. Harga stabil membuat inflasi lebih terkendali, sehingga kondisi makro ekonomi daerah menjadi lebih baik.

(2) Peningkatan dan/atau revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan

Peningkatan dan/atau revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan memiliki peran vital dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Sarana dan prasarana perdagangan disini tidak hanya pasar tradisional, termasuk juga pujasera, pertokoan, sarana distribusi barang, hingga *platform digital e-commerce* untuk perdagangan komoditi dan barang strategis lainnya.

Peningkatan dan/atau revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan dibutuhkan untuk menarik minat konsumen bertransaksi. Semakin besar nilai transaksi yang terjadi, maka kesempatan UMKM untuk bertumbuh dan berkembang akan semakin besar.

(3) Optimalisasi pelayanan metrologi legal

Dalam aktivitas kehidupan manusia, dari soal ekonomi hingga kesehatan, dari lahir hingga meninggal dunia, hampir tidak dapat dipisahkan dengan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Dapat dibayangkan jika alat UTTP yang digunakan, tidak akurat ukurannya. Dalam perdagangan, konsumen atau pedagang bisa dirugikan apabila ukuran timbangan tidak tepat. Di dunia Kesehatan, akurasi alat UTTP semakin krusial. Ketidak akuratan ukuran, takaran atau timbangan, berpotensi terjadinya kesalahan diagnosis maupun dosis obat yang diberikan. Hal ini jelas mengancam jiwa pasien.

Pentingnya akurasi alat UTTP dalam berbagai aktivitas masyarakat, belum didukung pelayanan prima penyelenggaraan tera/tera ulang. Cakupan tera dan/atau tera ulang alat UTTP yang ada di masyarakat masih rendah, karena pelaksanaan tera/tera ulang di Kabupaten Bangka Tengah masih bergantung dengan UPT metrologi Kota Pangkalpinang.

Untuk memperbesar cakupan tera/tera ulang alat UTTP, penyelenggaraan metrologi legal di Kabupaten Bangka Tengah tidak boleh lagi bergantung dengan daerah lain. Kabupaten Bangka Tengah harus mampu melaksanakan tera/tera ulang secara mandiri.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 – 2024;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 285);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
21. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1099).

E. Sistematika

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan |
| BAB IV | PENUTUP |



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

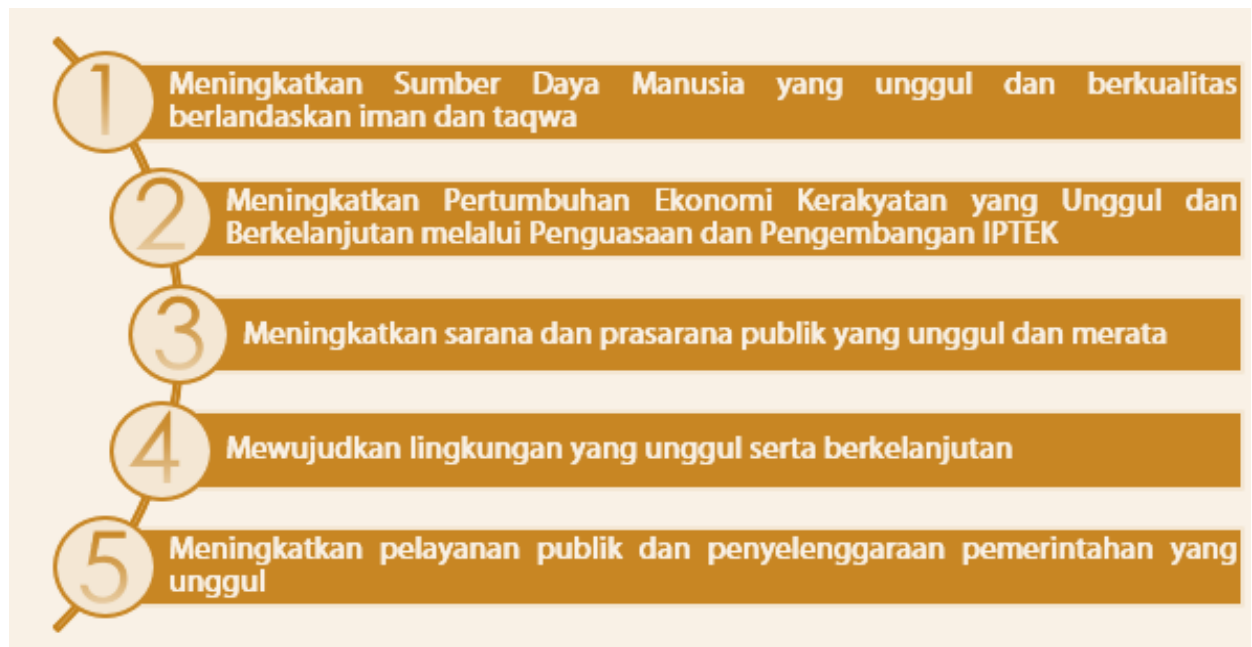
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2022 - 2026 menetapkan visi:



sebagai tema pembangunan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021 - 2026. Harapan besar yang terkandung didalam visi tersebut adalah Kabupaten Bangka Tengah memiliki keunggulan yang lebih di berbagai sektor pembangunan seperti sumber daya manusia, ekonomi, sarana prasarana, lingkungan dan birokrasi pemerintahan. Unggul disini berarti memiliki kemampuan, dan/atau kekuatan, berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:



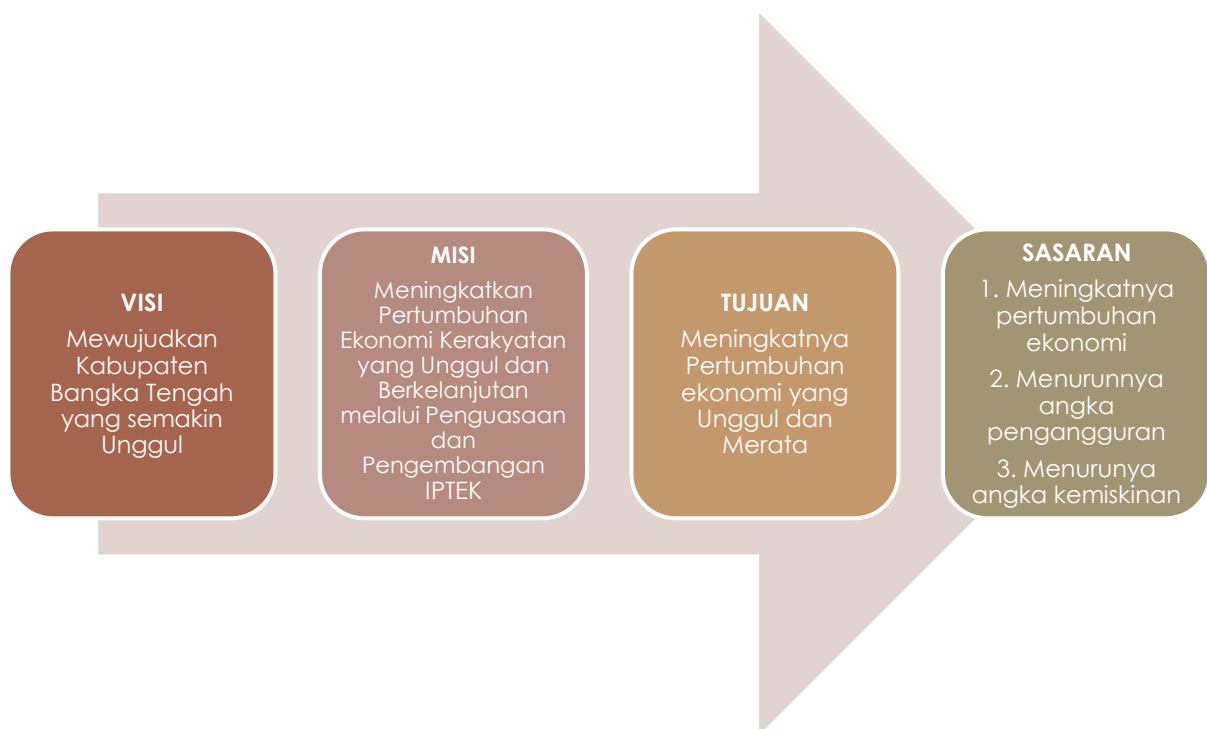
Secara holistik, setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dituntut mampu berkontribusi terhadap pencapaian kelima misi pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 - 2026. Namun ditinjau berdasarkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Perindagkop-UKM terkait erat dengan pencapaian misi kedua:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK.

Misi ini dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini akibat dampak pandemi COVID-19, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi *concern* serius masyarakat dan dunia usaha. Sementara penguasaan dan pengembangan IPTEK, dalam hal ini transformasi digital, diprediksi menjadi instrument utama perekonomian kedepan.

Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN



Misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK dalam rangka menyukseskan visi Kepala Daerah terpilih “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL” menjadi tantangan berat dimasa pandemi COVID-19 saat ini. Perekonomian dunia sedang terpuruk. Resesi ekonomi dunia tercatat sebesar -3,5% di tahun 2020, jauh lebih buruk dibandingkan -1,7% pada saat terjadi krisis finansial global di tahun 2009¹. Meskipun resesi di Indonesia tercatat sebesar -2,1%, lebih rendah dibandingkan negara *Emerging Markets and Developing Economies* (EMDEs) lainnya yang terkonstraksi sebesar -4,3%, upaya yang

¹ Sumber: Indonesia Economic Prospect – The World Bank

dibutuhkan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat sekaligus perjuangan menanggulangi pandemi COVID-19 perlu dikerahkan lebih besar. Terlebih dengan kondisi SDM daerah di luar Pulau Jawa – Bali, termasuk Bangka Tengah, yang masih cukup tertinggal. Optimisme perekonomian Kabupaten Bangka Tengah mampu pulih lebih cepat ditengah-tengah pandemi meningkat seiring perbaikan harga beberapa komoditi lokal, membaiknya kinerja industri rumah tangga dan pertumbuhan positif ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang triwulan I 2021. Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus bekerja keras mewujudkan visi dan misi kepala daerah, Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah menetapkan tujuan 5 (lima) tahun kedepan



yaitu:

Upaya ini tentu saja membutuhkan perubahan pola pikir yang didasari semangat '*not business as usual*'. Perubahan yang menuntut masyarakat untuk belajar terus menerus, untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri menjadi lebih tangguh, *agile*, inovatif dan kreatif. Pandemi COVID-19 yang telah memporak-porandakan hampir seluruh sektor usaha, mengajarkan bahwa pelaku usaha harus *aware* dengan perubahan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif, namun dari sisi positifnya terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu *outcome* dan *impact* dari program yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Tengah. Sebanyak 6 (enam) sasaran disusun sebagai strategi pencapaian tujuan dengan menggunakan pendekatan metode *balance scorecard*

(BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif yakni *stakeholder perspective*, *customer perspective*, dan *internal process perspective* sebagai berikut:

1. Perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*)

Menjaga kelangsungan usaha sekaligus mendorong produktivitas pelaku usaha mikro, usaha kecil, industri, pedagang, dan sektor usaha lainnya untuk membuat kondisi perekonomian daerah kembali bergairah menjadi harapan terbesar masyarakat, tidak saja untuk bertahan dimasa pandemi namun juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka kedepan. Menjawab tantangan ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Tengah merumuskan indikator-indikator kinerja strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang disusun selalu berada dijalur pencapaian tujuan yang ditetapkan.

2. Perspektif pelanggan (*customer perspective*)

a. Koperasi

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi” dengan indikator kinerja: *proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM* dari 1,01% di tahun 2021 menjadi 1,15% di tahun 2026.

Di masa pandemi COVID-19, koperasi berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Koperasi hadir membantu masyarakat memulai Kembali usaha mereka, Ketika perbankan tidak memungkinkan diakses. Terbukti dari volume usaha koperasi di tahun 2020 yang mampu tumbuh 60,61% dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Usaha mikro

Sasaran strategis kedua (SS-2) terkait pemberdayaan usaha mikro yang akan dicapai yaitu “Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik” dengan indikator kinerja:

1. Rasio kewirausahaan ditargetkan meningkat dari 5,90 di tahun 2021 menjadi 6,03 di tahun 2026.

2. Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah ditargetkan meningkat dari 32,31% di tahun 2021 menjadi 32,55% di tahun 2026.

c. Perdagangan

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai yaitu “Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting” dengan indikator kinerja: *koefisien variasi harga antar waktu antar waktu* yang ditargetkan mampu ditekan dibawah angka koefisien 10 (sepuluh) dalam lima tahun kedepan.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab” dengan indikator pencapaian:

1. Indeks keberdayaan konsumen ditargetkan mencapai angka indeks 40 di tahun 2026; dan
2. Indeks tertib ukur ditargetkan mencapai angka indeks 72 di tahun 2026.

d. Industri kecil dan rumah tangga

Sasaran strategis kelima (SS-5) terkait pemberdayaan dan pengembangan industri kecil dan rumah tangga yang akan dicapai yaitu “Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah” dengan indikator kinerja: Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan ditargetkan meningkat dari 17,07% di tahun 2021 menjadi 20% di tahun 2026.

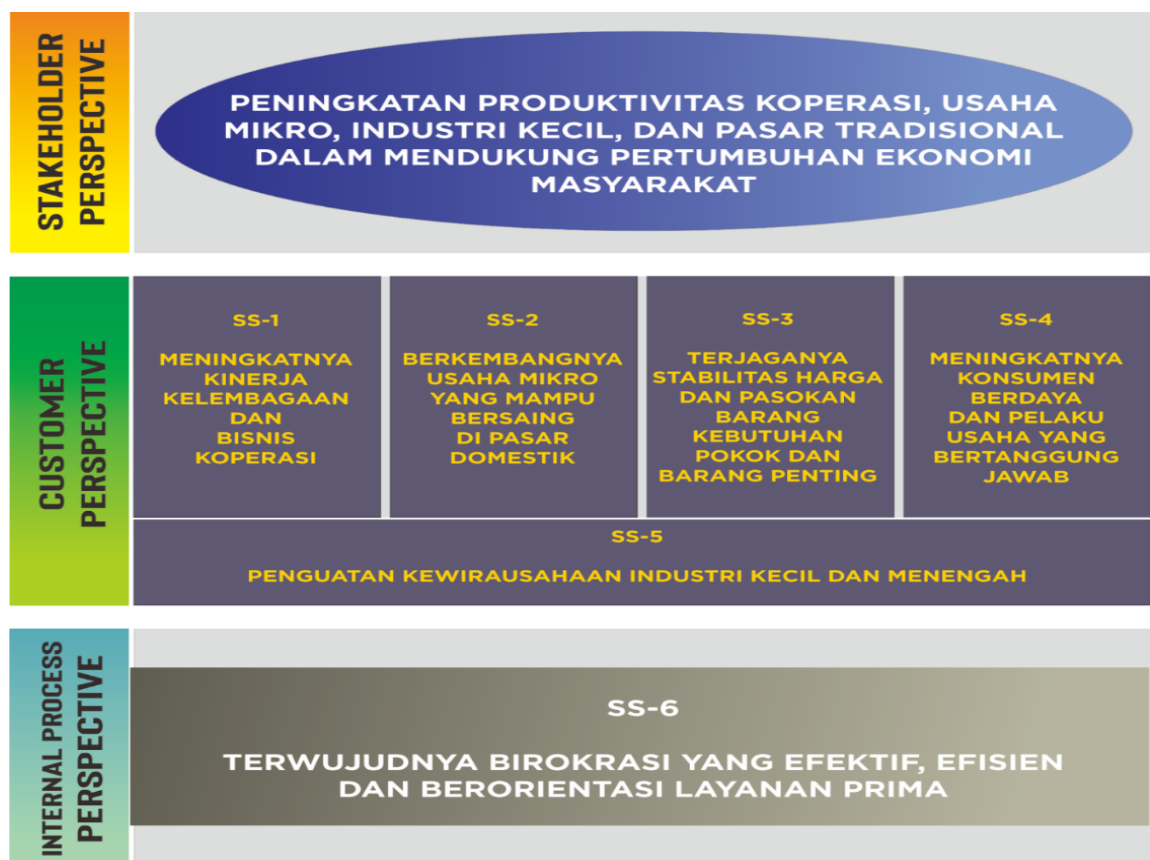
3. Perspektif proses internal (*Internal process*)

Bersamaan dengan reformasi sistem politik kearah yang lebih demokratis, berkembang pula pemikiran tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatunya menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kredibilitas, akuntabilitas dan mampu meningkatkan mutu pelayanan organisasi.

Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen meningkatkan kinerja setiap OPD secara terencana dan sistematis melalui pengelolaan manajemen internal OPD yang terpadu, mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai, sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Dilandasi keinginan untuk berkinerja tinggi dari tahun ke tahun, ditetapkan sasaran keenam (SS-6) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” dengan indikator kinerja:

1. Nilai SAKIP OPD meningkat dari angka indeks 78 di tahun 2021 menjadi 80,5 atau kategori A di tahun 2026; dan
2. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan OPD mampu dipertahankan untuk mendukung daeran meraih opini WTP.



Gambar 2. Korelasi Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 - 2026

Korelasi tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tergambar dalam target-target indikator tujuan dan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 – 2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|-----|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOPERASI, USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DALAM Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT | | 1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| | | | 2. Pertumbuhan Volume Usaha Mikro | 2,80 | 5,68 | 8,64 | 11,68 | 14,81 |
| | | | 3. Pertumbuhan Volume Usaha Industri Kecil | 1,50 | 3,02 | 4,57 | 6,14 | 7,73 |
| | | | 4. Pertumbuhan Nilai Transaksi Pasar Tradisional | 3,26 | 4,24 | 5,51 | 7,17 | 9,32 |
| | | 1. Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | 1,02% | 1,05% | 1,07% | 1,10% | 1,15% |
| | | 2. Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | 1. Rasio Kewirausahaan | 5,94% | 5,96% | 5,98% | 6,00% | 6,03% |
| | | | 2. Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | 32,37% | 32,44% | 32,48% | 32,52% | 32,55% |
| | | 3. Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Koefisien variasi harga antar waktu | 8,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 6,75 |
| | | 4. Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab | 1. Indeks Keberdayaan Konsumen | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | 2. Indeks Tertib Ukur | 55 | 59 | 64 | 68 | 72 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|------|------|------|----|
| | | 5. Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | 18,6 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 |
|--|--|--|---|------|------|------|------|----|

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah Nomor NOMOR: 188.4/1721/DIPERINDAGKOP-UKM/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SUMBER DATA | FORMULASI |
|----|---|--|------------------------------|---|
| 1 | Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | 1 Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | Data Bidang Koperasi dan UKM | $P_{kop} = \frac{V}{NP_{umkm}} \times 100\%$ <p> P_{kop} = Proporsi volume usaha koperasi V = Volume usaha koperasi tahun n. NP_{umkm} = Nilai produksi usaha mikro tahun n </p> |
| 2 | Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | 2 Rasio Kewirausahaan | Data Bidang Koperasi dan UKM | $r = \frac{\Delta ukm}{\Delta v}$ <p> r = Ratio kewirausahaan </p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Δ_{ukm} = Jumlah UKM – Jumlah UKM pertanian Δ_v = Jumlah penduduk – Jumlah UKM non pertanian |
| | | 3 | Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | Data Bidang Koperasi dan UKM | $C = \frac{NP}{PDRB} \times 100\%$ C = Kontribusi nilai tambah UKM NP = Nilai produksi UKM tahun n (ADHK) $PDRB$ = PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tengah tahun n |
| 3 | Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | 4 | Koefisien variasi harga antar waktu | Data harga barang pokok Bidang Perdagangan | $KV = \frac{s}{X} \times 100\%$ $s = \sqrt{\sum \frac{(Xi - X)^2}{n}}$ KV = Koefisien variasi harga antar waktu S = Simpangan baku X = Rata-rata harga komoditi Xi = Variabel harga komoditi dalam waktu tertentu n = Jumlah data yang digunakan |
| 4 | Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab | 5 | Indeks Keberdayaan Konsumen | Data Bidang Perdagangan | $Ikk = \frac{CS + CB + CA}{130}$ IKK = Indeks keberdayaan konsumen CS = Poin <i>Skill</i> konsumen, poin 45 CB = Poin <i>behaviour</i> konsumen, poin 45 CA = Poin <i>awareness</i> konsumen, poin 30 |
| | | 6 | Indeks Tertib Ukur | Data UPT Metrologi | $ITU = \frac{UTTP\ sah}{Total\ UTTP}$ ITU = Indeks tertib ukur |
| 5 | Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | 7 | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | Data Industri kecil dan menengah Bidang Perindustrian | $Pikm = \frac{NPikm}{PDRB} \times 100\%$ $Pikm$ = Proporsi nilai tambah produksi IKM $NPikm$ = Nilai tambah produksi IKM tahun n (ADHK). $PDRB$ = PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Kabupaten Bangka Tengah tahun n |

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 - 2026

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan begitu, melalui perjanjian kinerja, terwujud suatu komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Tidak saja mempertegas apa yang akan dan harus dilaksanakan tetapi juga menjadi alat ukur dan pernyataan rencana output dari kinerja yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | |
|-------------------|---|-------------------|--|--------|---|
| (1) | | (2) | | (3) | |
| 1 | Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | 1 | Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | 1,90 | % |
| 2 | Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | 2 | Rasio Kewirausahaan | 7,10 | |
| | | 3 | Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | 32,75 | % |
| 3 | Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | 4 | Koefisien variasi harga antar waktu | 10 | |
| 4 | Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab | 5 | Indeks Keberdayaan Konsumen | 52 | |
| | | 6 | Indeks Tertib Ukur | 50 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|---|
| 5 | Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | 7 | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | 28,50 | % |
|---|---|---|---|-------|---|

Beberapa target kinerja yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini telah dilakukan perubahan dibandingkan target yang tercantum didalam Renstra Tahun 2021–2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 – 2026. Perubahan target ini dilakukan setelah menela’ah, menganalisis dan memperhatikan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Anomali realisasi kinerja dalam beberapa pernyataan kinerja yang tercantum didalam Renstra ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi. Beberapa indikator kinerja yang sangat terdampak antara lain: (1) Bisnis koperasi, yang menjadi pilihan masyarakat ketika perbankan tidak dapat diakses dengan mudah, dan (2) Rasio kewirausahaan, karena masyarakat berbondong-bondong menjadi wirausaha untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Perubahan target kinerja dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target Kinerja IKU Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Yang Mengalami Perubahan

| SASARAN | | INDIKATOR SASARAN | | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Target Tahun 2024 | |
|---------|---|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------|
| | | | | | Renstra | PK |
| 1 | Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | 1 | Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | 1,84 | 1,07 | 1,90 |
| 2 | Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | 1 | Rasio Kewirausahaan | 7,04 | 5,98 | 7,10 |
| | | 2 | Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | 33,38 | 32,48 | 32,75 |
| 3 | Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | 1 | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | 26,06 | 19,20 | 25,00 |
| 4 | Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | 1 | Koefisien variasi harga antar waktu | 10,88 | 7,25 | 10,00 |
| 5 | Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab | 1 | Indeks Keberdayaan Konsumen | 38,39 | 38 | 52 |
| | | 2 | Indeks Tertib Ukur | 44,4 | 64 | 40 |

Upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilaksanakan melalui penyelenggaraan program/kegiatan sebagaimana tercantum didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

| No. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN (Rp) | |
|-----|--|--|--------|-----------------|-----------------|
| | | | | INDUK | PERUBAHAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase KSP/USP memiliki izin usaha simpan pinjam | 0 | Rp30.000.000 | Rp0 |
| 2 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi berkualitas | 18 | Rp45.000.000 | Rp39.950.000 |
| 3 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase KSP/USP aktif dengan kategori sehat | 100 | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 |
| 4 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi modern | 10 | Rp606.707.000 | Rp606.707.000 |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro tangguh | 9 | Rp1.017.000.000 | Rp997.030.000 |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro Naik Kelas | 2 | Rp451.000.000 | Rp439.870.000 |
| 7 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin sesuai ketentuan | 65 | Rp35.000.000 | Rp25.000.000 |
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase peningkatan transaksi pasar tradisional | 3 | Rp1.834.550.000 | Rp1.834.550.000 |
| 9 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Indeks harga konsumen (Barang kebutuhan Pokok) | 125 | Rp423.195.000 | Rp393.195.000 |
| 10 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang | 50 | Rp182.995.000 | Rp182.995.000 |
| 11 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase komoditi daerah yang terserap di pasar lokal | 40 | Rp72.000.000 | Rp72.000.000 |

| | | | | | |
|----|---|--|-----|---------------|---------------|
| 12 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pertumbuhan nilai produksi Sentra IKM | 10 | Rp778.400.000 | Rp778.400.000 |
| 13 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase Industri yang memiliki perizinan usaha sesuai ketentuan | 2,8 | Rp43.000.000 | Rp43.000.000 |

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengkategorian predikat capaian kinerja menggunakan pendekatan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Sangat Memuaskan | > 90 |
| 2 | Memuaskan | 80 - 90 |
| 3 | Baik | 70 - 80 |
| 4 | Cukup | 60 - 70 |
| 5 | Kurang | < 60 |

Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja beserta analisis hasil kinerja Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 berdasarkan indikator-indikator kinerja yang diperjanjikan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berikut efisiensi dan efektivitas anggaran daerah yang digunakan.

B. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Secara umum, realisasi kinerja sasaran Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah yang tercantum didalam dokumen perencanaan dan diperjanjikan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET * | REALISAS I | CAPAIAN (%) | KATEGORI |
|--|--|-------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | 1 Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | 1,90 | 1,88 | 98,95% | Sangat Memuaskan |
| 2 | 2 Rasio Kewirausahaan | 7,10 | 7,21 | 100% | Sangat Memuaskan |

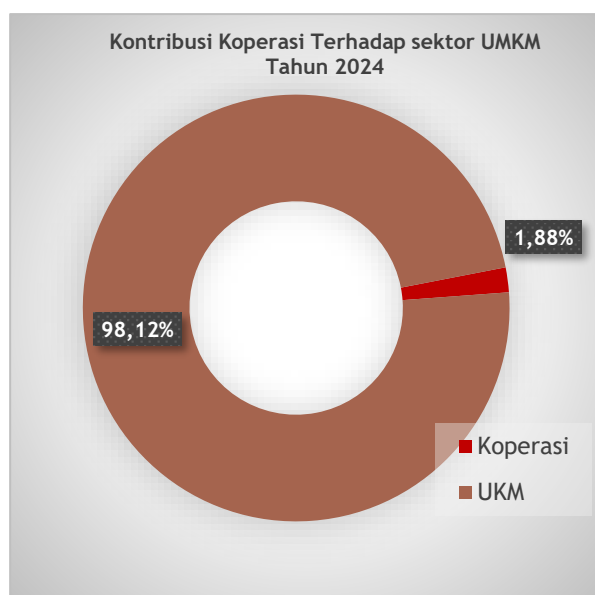
| | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|--------|------------------|
| Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | 3 | Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | 32,75 | 32,13 | 98,11 | Sangat Memuaskan |
| 3 Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | 4 | Koefisien variasi harga antar waktu | 10 | 10,16 | 98,43% | Sangat Memuaskan |
| 4 Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab | 5 | Indeks Keberdayaan Konsumen | 52 | 46,79 | 89,98% | Memuaskan |
| | 6 | Indeks Tertib Ukur | 50 | 69,31 | 100% | Sangat Memuaskan |
| 5 Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | 7 | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | 28,50 | 26,92 | 94,46% | Sangat Memuaskan |
| RATA – RATA KINERJA | | | | | 97,13% | Sangat Memuaskan |

C. Analisis Capaian Kinerja Dinas Perindagkop-UKM Tahun 2024

01 Sasaran Kinerja 1 Meningkatkan kinerja bisnis koperasi

| | | | |
|----------------------------|---|--|------------------------------|
| Indikator Kinerja 1 | : | Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | |
| Target Kinerja TA. 2024 | : | 1,90% | Realisasi Kinerja: 98,95% |
| Realisasi Kinerja TA. 2024 | : | 1,88% | |

❖ Realisasi Kinerja Tahun 2024



Perlambatan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2024 tentu berdampak diseluruh sektor ekonomi masyarakat, tidak terkecuali perkoperasian. Bisnis koperasi tercatat tumbuh sebesar 2,65% tahun 2024 atau berkontraksi sebesar 4,96% dibanding tahun sebelumnya (yoy). Terhadap total kontribusi bisnis usaha mikro dalam ekonomi Kabupaten Bangka Tengah, *share* koperasi tercatat sebesar 1,88% dari target 1,90% yang ditetapkan.

Dari total 102 koperasi aktif², kontribusi bisnis koperasi Kabupaten Bangka Tengah hanya didorong oleh 19 unit koperasi atau hanya 18,63% saja. Bisnis koperasi besar seperti KSP Mitra Utama hanya bertumbuh 3,56%, terendah dalam 5 tahun terakhir. Koperasi PLN Babel menjadi satu-satunya koperasi besar yang mampu menjaga performa bisnisnya tumbuh meyakinkan di tahun 2024 dengan peningkatan volume usaha sebesar 45,62%.

Pertumbuhan signifikan justru ditunjukkan oleh koperasi-koperasi kecil seperti Koperasi Produsen Aroma Bumi Nusantara yang tumbuh 995,05% atau hampir 10 kali lipat, diikuti Koperasi Harapan Nelayan dan Koperasi Wanita Cahaya Bunda dengan pertumbuhan hampir 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Data Koperasi Aktif Berkontribusi Dalam Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

| NO | NAMA KOPERASI | TANGGAL RAPAT ANGGOTA TAHUNAN | | VOLUME USAHA | |
|----|--|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
| 1 | Koperasi Kurau Mina Lestari | 02 Agustus 2023 | 07 Juli 2024 | 5.680.562.268,00 | 6.085.289.424,00 |
| 2 | Koperasi Bina Tani Sejahtera | 10 Maret 2023 | 16 Februari 2024 | 182.651.000,00 | 275.007.573,00 |
| 3 | Kopkar RSUD Kab. Bangka Tengah | 17-Apr-23 | 26 Maret 2024 | 993.552.681,00 | 1.955.002.604,00 |
| 4 | Koperasi Bina Sejahtera Utama | 29 Januari 2023 | 28 Januari 2024 | 757.200.000,00 | 758.450.000,00 |
| 5 | Koperasi Konsumen Seuntai Sejati | 21 Maret 2023 | 06 Maret 2024 | 149.589.712,00 | 167.540.966,00 |
| 6 | Koperasi Simpan Pinjam Baitul Hikmah | 30 Januari 2023 | 08 Maret 2024 | 26.500.000,00 | 51.884.643,00 |
| 7 | KOPERASI KONSUMEN NELAYAN KIARA JAYA | 26 Mei 2023 | 26 Januari 2024 | 18.035.000,00 | 25.000.000,00 |
| 8 | KOPERASI PRODUSEN AROMA BUMI NUSANTARA | 27 Januari 2023 | 26 Januari 2024 | 1.050.000,00 | 11.498.000,00 |
| 9 | Kopwan Nurul Fajri | 03 Februari 2023 | 01 Februari 2024 | 101.000.000,00 | 103.980.250,00 |
| 10 | KSU Sahabat Kita | 21 Maret 2023 | 06 Maret 2024 | 1.400.000,00 | 1.425.000,00 |
| 11 | Koperasi Wanita Cahaya Bunda | 17 Maret 2023 | 16 Agustus 2024 | 45.500.000,00 | 148.689.000,00 |
| 12 | Koperasi Karya Bersama | 08 Desember 2023 | 45537 | 241.720.000,00 | 242.345.700,00 |
| 13 | Kop PLN Babel | 12-Apr-23 | 27 Maret 2024 | 5.779.195.738,00 | 8.415.938.035,00 |
| 14 | KSP Mitra usaha Utama | 14 Mei 2023 | 45410 | 13.778.960.000,00 | 14.269.976.342,00 |
| 15 | Kop Konsumen Harapan Nelayan | 5 Agustus 2023 | 25 Agustus 2024 | 229.304.000,00 | 902.318.500,00 |
| 16 | Koperasi Jaya Mandiri | 15 Maret 2023 | 25 Maret 2024 | 36.728.000,00 | 108.705.194,00 |
| 17 | Kopwan Al-Ikhlas | | 02 Agustus 2024 | 3.000.000,00 | 4.740.000,00 |
| 18 | Koperasi Konsumen Sepakat | 27 Juni 2023 | 05 Agustus 2024 | 40.700.000,00 | 114.657.500,00 |
| 19 | Koperasi Simpan Pinjam Bangka Agro Sejahtera | - | 19 Januari 2024 | 5.000.000,00 | 241.325.000,00 |

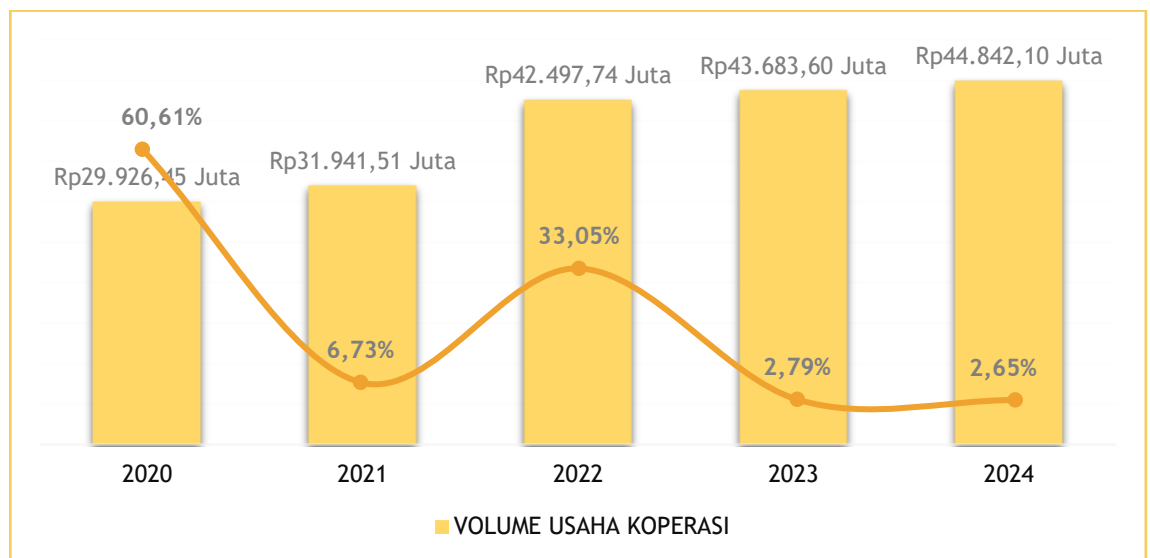
(Sumber: Data RAT Koperasi Tahun 2024 – Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah)

² Jumlah total koperasi aktif tahun 2024 sebanyak 102 Unit dari total 159 Unit koperasi (64,20%)

❖ Kinerja Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Sejak Covid-19 tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya anomalitas, perkembangan bisnis koperasi terus mengalami perlambatan. Di masa pandemi terjadi, masyarakat sulit berusaha. Pendapatan masyarakat terganggu dan perbankan menahan kucuran dana, terutama untuk konsumtif dan bisnis-bisnis mikro yang beresiko tinggi, koperasi menjadi andalan masyarakat untuk bertahan. Tidak heran volume usaha koperasi melesat tinggi. Ketika kondisi ekonomi masyarakat membaik, koperasi tidak menjadi opsi. Untuk pinjaman konsumtif dan kebutuhan permodalan usaha, masyarakat lebih mengutamakan sektor perbankan. Sebagian masyarakat bahkan mulai menggunakan pinjaman online (*fintech*) sebagai solusi masalah finansialnya.

Grafik Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Tahun 2020 – 2024



Data ini mempertegas informasi bahwa koperasi belum menjadi lembaga yang dipercaya sebagian besar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Koperasi dipandang sebagai lembaga pinjaman uang yang tidak memiliki kredibilitas mumpuni, berbunga tinggi, atau tidak lebih dari perantara untuk mendapatkan bantuan pemerintah semata. Tidak mengherankan dari 102 unit koperasi berstatus aktif, hanya 19 unit saja yang bertumbuh usahanya.

Kabupaten Bangka Tengah belum memiliki koperasi yang dapat menjadi percontohan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang betul-betul memenuhi prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. KSP Mitra Usaha Utama yang memiliki sistem manajemen mumpuni dianggap memiliki dukungan Yayasan besar dibelakangnya. Koperasi PLN Babel dan RSUD Kabupaten Bangka Tengah merupakan koperasi karyawan.

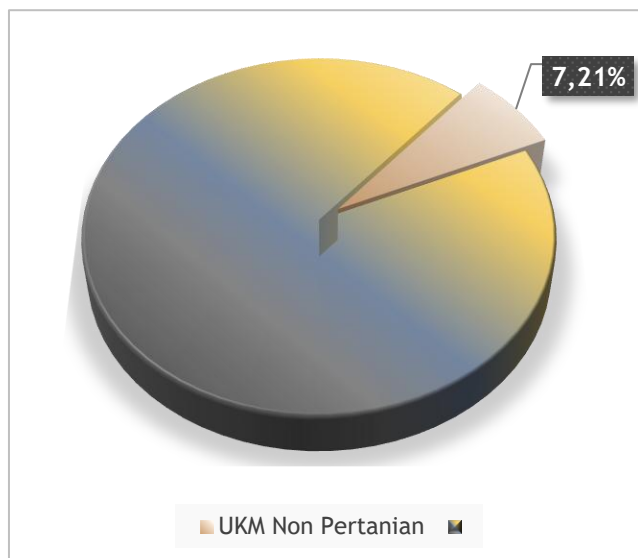
Harapan meningkatkan peran koperasi Kabupaten Bangka Tengah untuk perekonomian masyarakat hadir melalui Koperasi Produsen Aroma Bumi

Nusantara. Koperasi yang memproduksi minyak atsiri kayu putih ini perlu mendapat dukungan untuk menjadi percontohan sekaligus menanamkan *image* bahwa koperasi bukan lagi sekedar lembaga tempat pinjam meminjam uang saja, melainkan sebuah korporasi bisnis yang dimiliki dan dikelola masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

02 Sasaran Kinerja 2 *Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik*

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Indikator Kinerja 2 | : Rasio Kewirausahaan | |
| Target Kinerja TA. 2024 | : 7,10% | Realisasi Kinerja: |
| Realisasi Kinerja TA. 2024 | : 7,21% | 100% |

❖ Realisasi Kinerja Tahun 2024



Rasio kewirausahaan merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan dalam suatu wilayah atau negara. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat atau individu terlibat dalam kegiatan kewirausahaan.

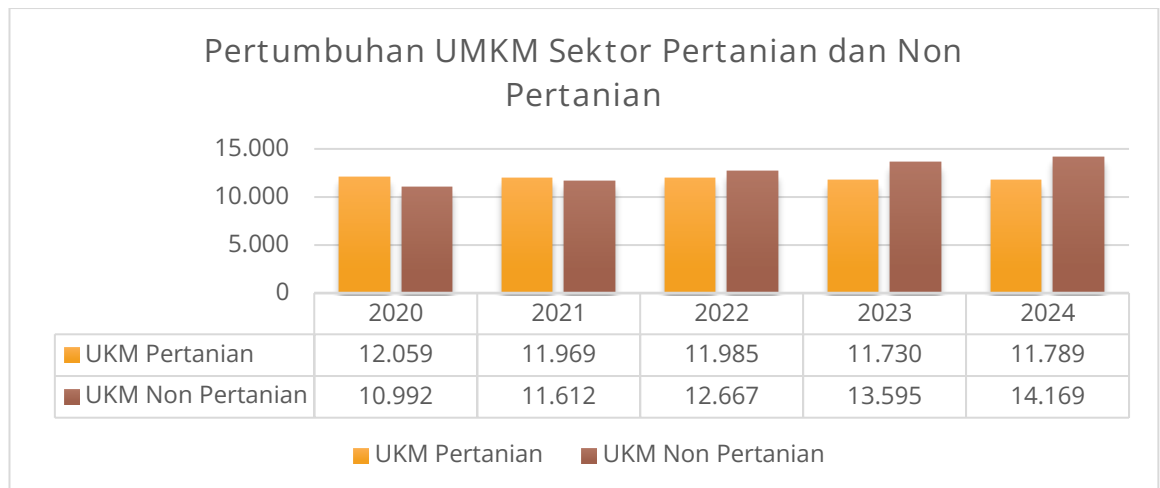
Realisasi rasio kewirausahaan Tahun 2024 tercatat sebesar 7,21% dari target 7,10%.

Jumlah pelaku UMKM tahun 2024 tercatat tumbuh 2,50% dibanding tahun sebelumnya dengan komposisi:

- Pelaku UMKM Non pertanian tercatat tumbuh sebesar 4,22%; dan
- Pelaku UMKM sektor pertanian tumbuh sebesar 0,50% dibanding tahun sebelumnya.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah usaha mikro sekaligus mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha. *E-commerce* membuka pintu bagi pertumbuhan usaha mikro melalui peluang menghasilkan uang yang cukup potensial bagi masyarakat dengan modal yang tergolong minim. Tidak hanya anak-anak muda, tidak sedikit pegawai atau karyawan mencoba berbisnis online untuk sekedar mencari tambahan penghasilan.

❖ Kinerja Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir



Sejak pandemi tahun 2020, jumlah pelaku usaha non pertanian telah tumbuh sebesar 28,90% dengan rata-rata pertumbuhan 6,57% per tahun. Tren berwirausaha masyarakat tumbuh luarbiasa disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Perkembangan *E-commerce* yang memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi siapa saja untuk memulai usaha. Modal yang dibutuhkan relatif rendah. Anak-anak muda, khususnya pelajar dan mahasiswa bahkan tidak perlu menunggu selesai pendidikan untuk mulai berwirausaha.
2. Maraknya berbagai program pemerintah untuk UMKM, terutama melalui penyelenggaraan bazaar-bazaar, pelatihan vokasi dan dukungan-dukkungan lain berupa bantuan usaha, menjadi salah satu pendorong masyarakat berwirausaha.
3. Minimnya investasi industri padat karya yang masuk ke Kabupaten Bangka Tengah, sehingga memaksa masyarakat untuk berwirausaha sebagai jalan untuk mendapatkan penghasilan.

Berbanding terbalik, pertumbuhan UMKM sektor pertanian justru mengalami kontraksi sebesar 2,24% dalam 5 tahun terakhir. Faktor lahan yang semakin terbatas, kebutuhan modal usaha cukup besar, harus bekerja keras, dan hasil tidak bisa instan menjadikan sektor ini kurang diminati, terutama bagi anak-anak muda, sebagai pilihan wirausaha mereka.

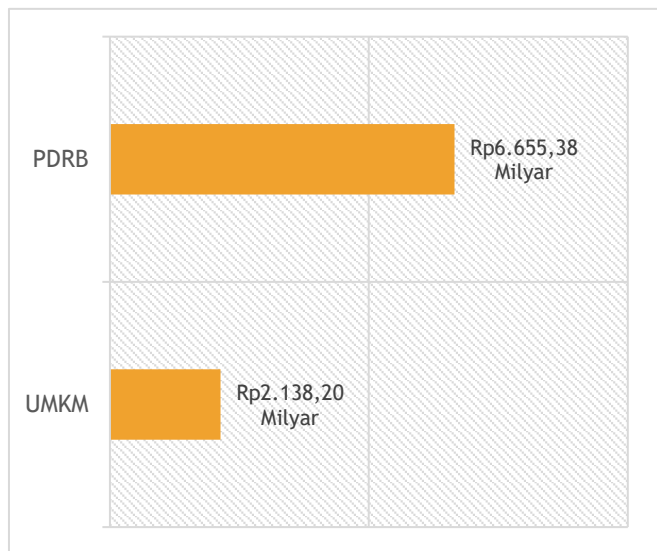
Sekalipun data pertumbuhan wirausaha cukup signifikan, kondisi ini tidak secara paralel menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar usaha mikro baru yang lahir, didasarkan secara coba-coba, baik karena maraknya bazaar UMKM ataupun fasilitas-fasilitas pujasera yang bermunculan.

03 Sasaran Kinerja 2

Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik

| | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|
| Indikator Kinerja 3 | : | Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | |
| Target Kinerja TA. 2024 | : | 32,75% | Realisasi Kinerja: |
| Realisasi Kinerja TA. 2024 | : | 32,13% | 98,11% |

❖ Realisasi Kinerja Tahun 2024



Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB tahun 2024 tercatat sebesar 32,13%, lebih rendah dibanding target kinerja yang ditetapkan sebesar 32,75%. Dibandingkan PDRB Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 yang mengalami kontraksi sebesar 0,36%³, volume usaha mikro terkontraksi lebih dalam. Pertumbuhan volume usaha mikro tercatat -1,60% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

Kasus korupsi timah yang menjerat pemilik beberapa perusahaan smelter dan CPO di Kabupaten Bangka Tengah berdampak cukup besar bagi perekonomian masyarakat. Sektor-sektor ekonomi andalan masyarakat mengalami tekanan cukup besar. Lapangan usaha (LU) Industri pengolahan terkontraksi 7,68%, LU pertambangan tercatat turun 7,13%, LU perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh sebesar 0,03%.

Kondisi ini menjadi tidak berpihak terhadap bisnis UMKM karena lebih dari 70% hasil produksi masih mengandalkan pasar lokal. Pelaku UMKM baru bertumbuh, kompetitor bertambah, sementara *size market* tidak bertambah. Perubahan perilaku konsumen yang semakin nyaman berbelanja melalui *online shop* juga tidak bisa diabaikan potensi pengikisannya terhadap UMKM yang masih mengandalkan bisnis secara konvensional.

❖ Kinerja Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

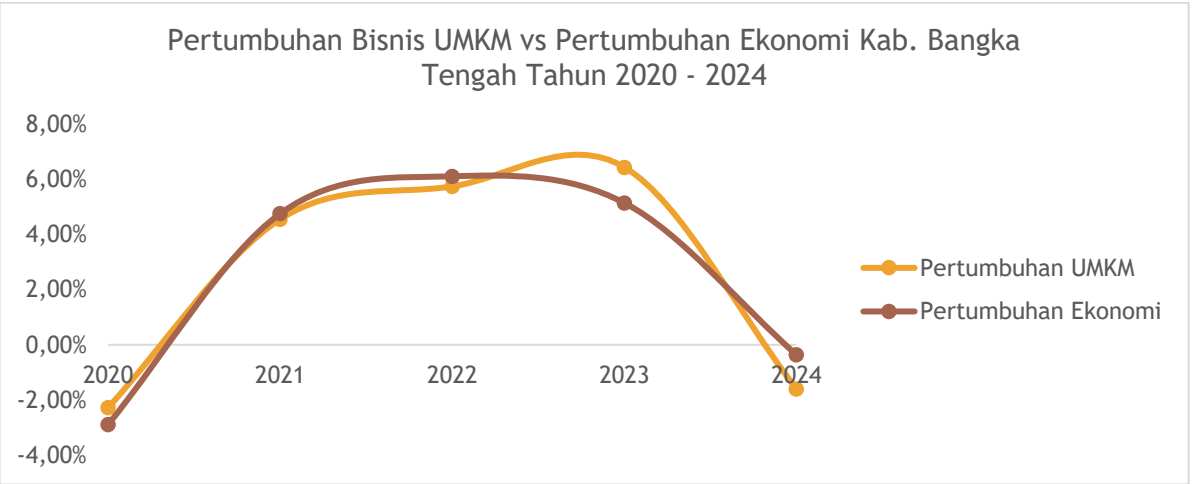
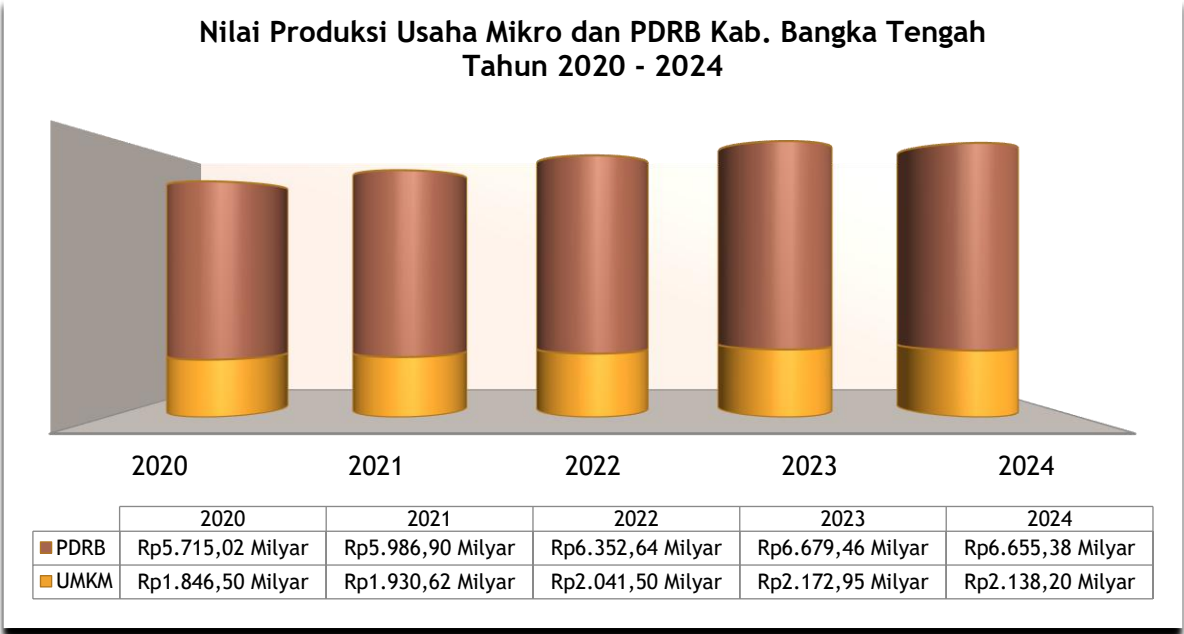
Pertumbuhan bisnis UMKM menunjukkan kinerja positif pasca pandemi Covid tahun 2020, dengan puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2023 sebesar 6,44%. Kondisi ini tidak berlanjut di tahun 2024, dimana pertumbuhan bisnis UMKM harus terkontraksi cukup dalam sebesar 1,60% terdampak permasalahan tata kelola timah

³ Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2025 - BPS

yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi baik bijih maupun logam timah dan penurunan realisasi proyek infrastruktur Pemerintah sebagai imbas defisit anggaran yang terjadi. Timah masih menjadi fondasi utama ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Tidak heran ketika lapangan usaha ini terhambat, dampak terhadap ekonomi masyarakat diberbagai sektor cukup signifikan.

Grafik Infografis Pertumbuhan Bisnis UMKM dan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 - 2024

| TAHUN | UMKM | PDRB | Share UMKM Terhadap PDRB | Pertumbuhan UMKM | Pertumbuhan Ekonomi |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| 2020 | Rp1.846,50 Milyar | Rp5.715,02 Milyar | 32,31% | -2,28% | -2,89% |
| 2021 | Rp1.930,62 Milyar | Rp5.986,90 Milyar | 32,25% | 4,56% | 4,76% |
| 2022 | Rp2.041,50 Milyar | Rp6.352,64 Milyar | 32,14% | 5,74% | 6,11% |
| 2023 | Rp2.172,95 Milyar | Rp6.679,46 Milyar | 32,53% | 6,44% | 5,14% |
| 2024 | Rp2.138,20 Milyar | Rp6.655,38 Milyar | 32,13% | -1,60% | -0,36% |

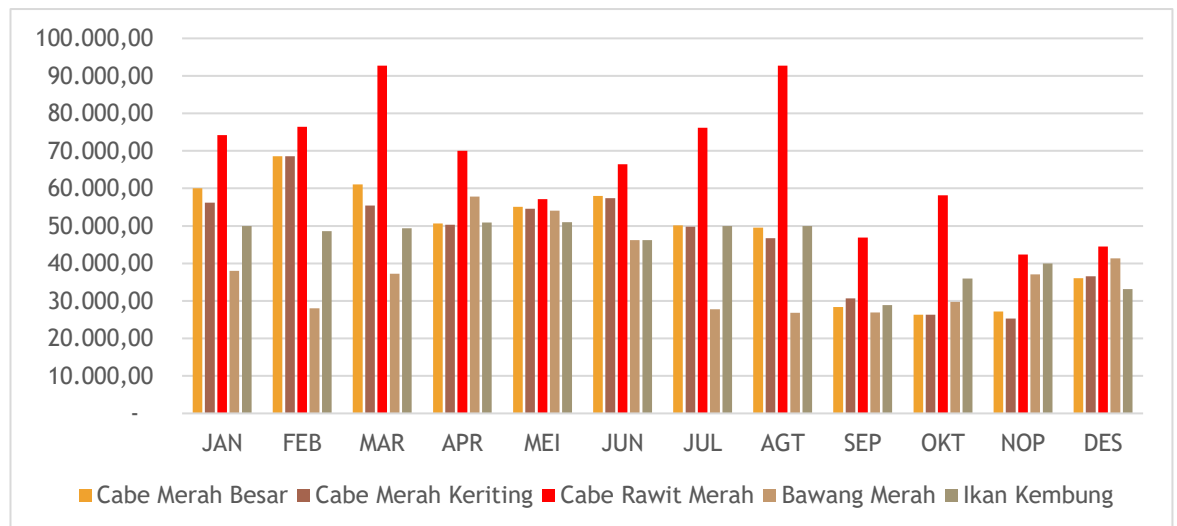


04 Sasaran Kinerja 3

Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| Indikator Kinerja 4 | : | Koefisien variasi harga antar waktu | |
| Target Kinerja TA. 2024 | : | 10 | Realisasi Kinerja: |
| Realisasi Kinerja TA. 2024 | : | 10,16 | 98,43% |

❖ Realisasi Kinerja Tahun 2024



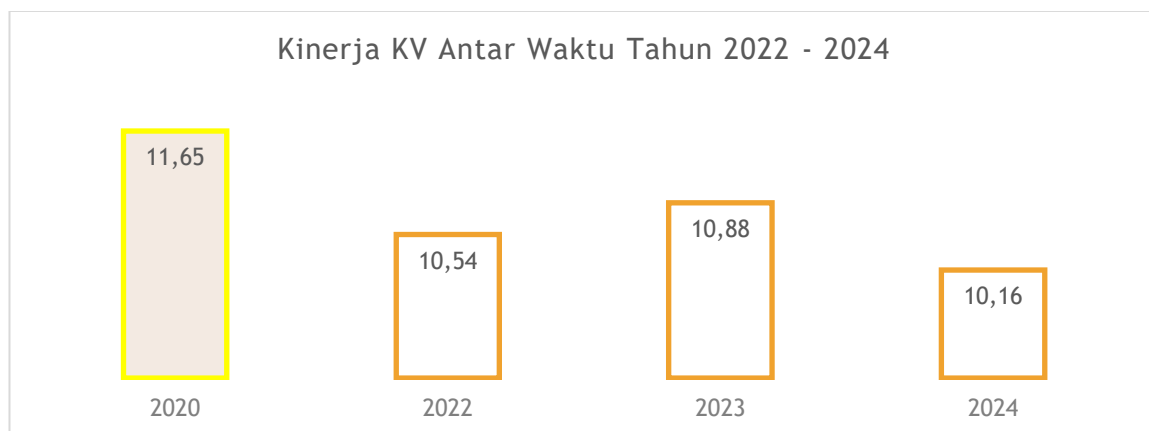
Grafik Data 5 Komoditi Dengan Fluktuasi Harga Tertinggi Tahun 2024

Koefisien variasi harga (KV) adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar variasi harga terhadap rata-ratanya. KV dapat digunakan untuk mengamati variansi data harga komoditas pangan, dimana semakin kecil nilai KV semakin baik atau semakin homogen data harga komoditi yang disajikan. Komoditas bahan pokok yang diformulasikan dalam penghitungan KV antar waktu ini dibatasi pada komoditi-komoditi bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Secara kinerja, realisasi KV antar waktu tahun 2024 tercatat sebesar 10,16 dari target kinerja KV di angka 10 skala rasio. Seperti tahun-tahun sebelumnya, komoditi cabe dan bawang merah masih menjadi komoditi bahan pokok paling sulit dikontrol stabilitas harganya sekalipun Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu daerah produsen cabe merah di Pulau Bangka. *Supply* cabe hasil perkebunan rakyat diseluruh daerah di Pulau Bangka belum mampu memenuhi kebutuhan cabe masyarakat. Kekurangan pasokan ini ditutup dengan impor cabe dari daerah lain yang secara harga lebih rendah. Ketika pasokan cabe dari luar daerah terlambat,

harga cabe dipasaran akan melonjak tinggi dan ketika pasokan datang, harga cabe dapat turun drastis.

❖ **Kinerja Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir**



Fluktuasi harga komponen komoditas cabe, bawang merah, dan ikan segar belum mampu dikontrol dengan baik dalam 5 tahun terakhir. Kondisi ini diprediksi masih akan terus terjadi jika produksi yang dihasilkan daerah, belum mampu mencukupi permintaan daerah.

Bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah berupaya terus menerus untuk mengendalikan harga pangan, terutama pada komponen-komponen komoditi yang berpengaruh terhadap inflasi melalui gelar pasar murah, subsidi bahan pokok, sidak agen dan distributor. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga berpartisipasi secara aktif menggelar kegiatan pasar tani untuk membantu masyarakat dan petani mendapatkan harga yang menguntungkan keduanya.

. **Sasaran Kinerja 4** **Meningkatnya Konsumen Berdaya dan**
05 **Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab**

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Indikator Kinerja 5 | : | Indeks Tertib Ukur | |
| Target Kinerja TA. 2024 | : | 50 | Realisasi Kinerja: |
| Realisasi Kinerja TA. 2024 | : | 69,31 | 100% |

❖ **Realisasi Kinerja Tahun 2024**

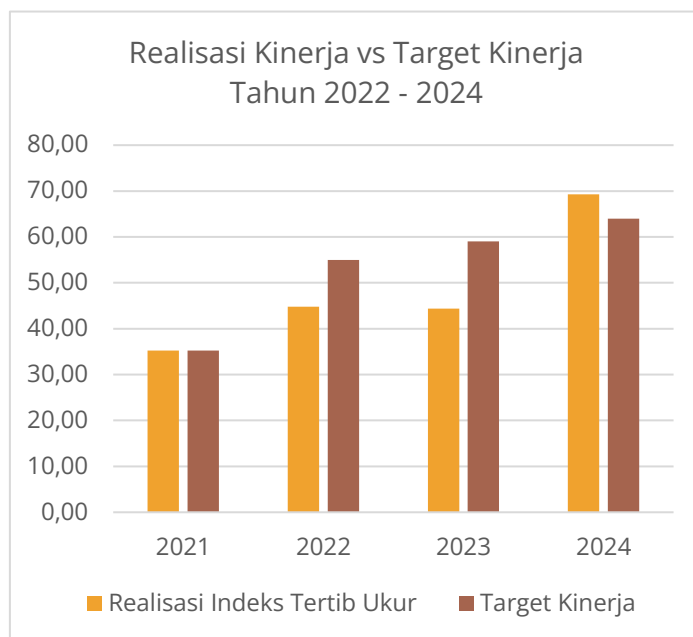
Tera dan tera ulang wajib dilakukan untuk memastikan akurasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan pedagang dari kerugian yang mungkin terjadi akibat alat UTTP yang tidak akurat. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menargetkan nilai indeks tertib ukur sebesar 50 skala rasio dengan harapan sebanyak 1.178 unit alat UTTP yang digunakan pelaku usaha memiliki tanda tera sah di tahun 2024. Target ini berhasil dicapai dengan baik dengan total unit UTTP bertanda tera sah sebanyak 1.633 unit atau secara rasio

sebesar 69,31 skala rasio. Realisasi ini meningkat 56,12% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.4 Realisasi Tera/Tera Ulang Tahun 2024

| | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | Total |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| PUBBM | 10 | 2 | 26 | 10 | 44 | 6 | | 12 | 26 | 30 | | 2 | 168 |
| Pegas | | 2 | 12 | | 120 | 418 | 164 | 228 | 6 | 20 | 1 | | 971 |
| Sentisimal | | 1 | 6 | | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | | 1 | 32 |
| TE | | 1 | 17 | 2 | 77 | 154 | 2 | 40 | 12 | 3 | 11 | 1 | 320 |
| Perlengkapan | | 4 | 14 | | 17 | 21 | 4 | 21 | 8 | 16 | | 4 | 109 |
| TJE | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | | | 23 |
| TBI | | | | | | 4 | | 3 | | | | | 7 |
| Flow Meter | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Tangki Ukur | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 1.633 |

❖ Kinerja Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir



Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan sebagai satu-satunya daerah di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) di tahun 2024. Prestasi ini tak terlepas dari kerja keras Pemkab Bangka Tengah untuk terus meningkatkan pelayanan tera/tera ulang ditengah-tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Sejak tera/tera ulang dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemkab. Bangka Tengah di

tahun 2022, tahun 2024 menjadi kali pertama dalam periode Renstra Tahun 2021 - 2026 target kinerja yang ditetapkan berhasil dilampaui,

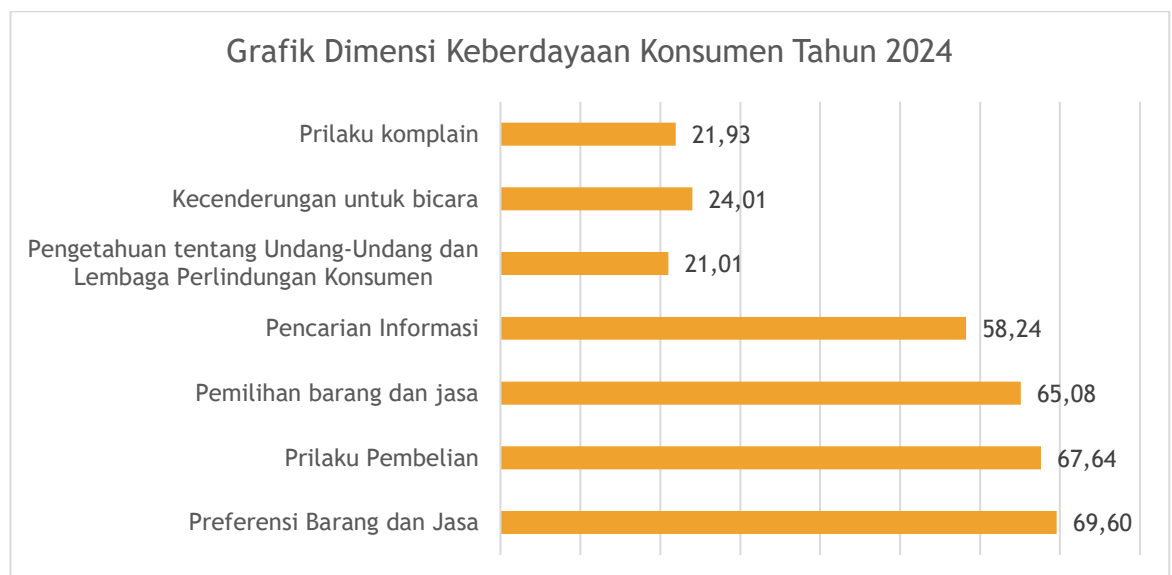
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Potensi alat UTTP Bangka Tengah | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
| Alat UTTP di tera/tera ulang | | | | |
| - Timbangan | 792 | 895 | 893 | 1121 |
| - Timbangan Jembatan | 9 | 18 | 14 | 23 |
| - Timbangan Elektronik | 10 | | | 320 |
| - Tangki Ukur | 3 | | | 1 |
| - Nozzle SPBU | 16 | 142 | 139 | 168 |
| | 830 | 1.055 | 1.046 | 1.633 |
| Indeks Tertib Ukur | 35,23 | 44,78 | 44,40 | 69,31 |

Peningkatan signifikan realisasi tera/tera ulang sebesar 56,12% dibanding tahun sebelumnya dapat diwujudkan melalui perluasan sasaran pemilik/pengguna alat UTTP yang ditera/tera ulang. Sebelumnya tera/tera ulang lebih banyak menyasar pemilik UTTP yang bergerak di sektor perdagangan, perkebunan, dan bisnis lainnya. Tahun 2024, sasaran ini diperluas dengan menyasar pengguna UTTP di layanan kesehatan. Akurasi UTTP di sektor ini sangat penting yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

06 Sasaran Kinerja 4 *Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab*

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| Indikator Kinerja 6 | : | Indeks Keberdayaan Konsumen | |
| Target Kinerja TA. 2024 | : | 52 | Realisasi Kinerja: |
| Realisasi Kinerja TA. 2024 | : | 46,79 | 89,98% |

❖ Realisasi Kinerja Tahun 2024



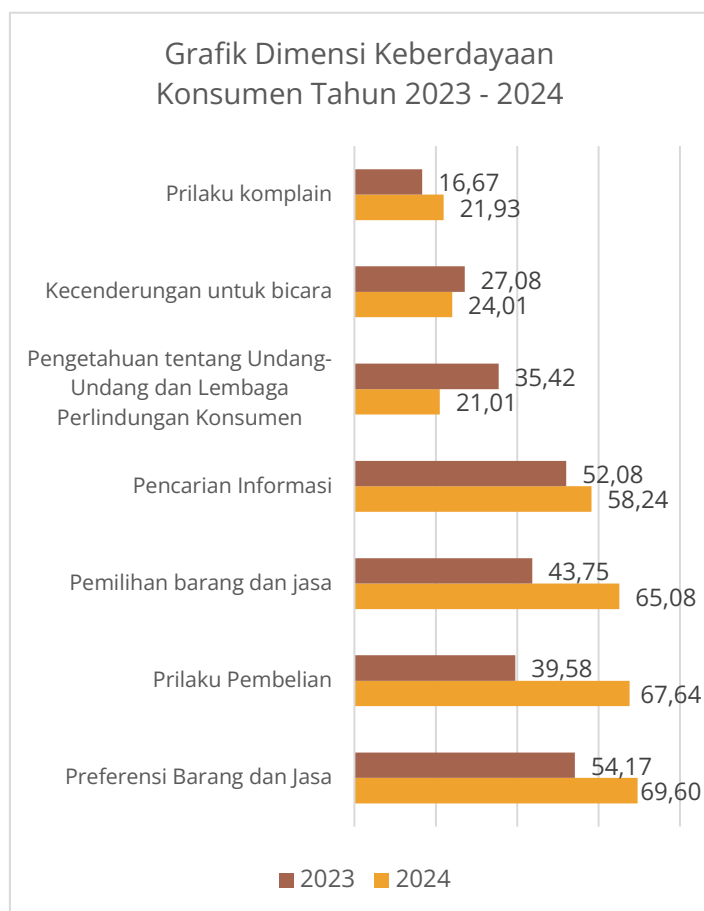
Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) adalah indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman, dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Konsumen merupakan prioritas yang harus dilayani dan dilindungi kepentingannya, karena merupakan aset penting bagi perekonomian.

Responden pada survey tahun 2024 ini ditujukan kepada para pelaku UMKM untuk mengetahui tingkat pemahamannya terhadap perlindungan konsumen melalui prilaku pembelian bahan baku dan bahan penolong untuk usaha mereka.

Hasil penyusunan Survei Indeks Keberdayaan Konsumen Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah berada pada kategori Mampu, yaitu dengan nilai IKK adalah 46,79. Berdasarkan dimensi yang di survey, pengetahuan tentang UU Perlindungan Konsumen (PK) dan lembaga PK, kecenderungan untuk bicara dan prilaku komplain

masih sangat rendah. Namun untuk *awareness* responden terkait perilaku mencari preferensi dalam membeli barang dan jasa sudah cukup baik.

❖ Kinerja Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir



Survey Indeks Keberdayaan Konsumen Kabupaten Bangka Tengah baru dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir dimana terdapat peningkatan signifikan dari 38,39 di tahun 2023, meningkat 21,88% menjadi 46,79 skala indeks di tahun 2024. Meskipun demikian, peningkatan ini belum bisa dijadikan barometer adanya peningkatan keberdayaan konsumen karena dalam 2 edisi survey, kategori respondennya berbeda. Namun tentu saja ini merupakan hal yang baik karena Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat memetakan tingkat pemahaman masyarakat

terhadap perlindungan konsumen dalam berbagai kategori masyarakat.

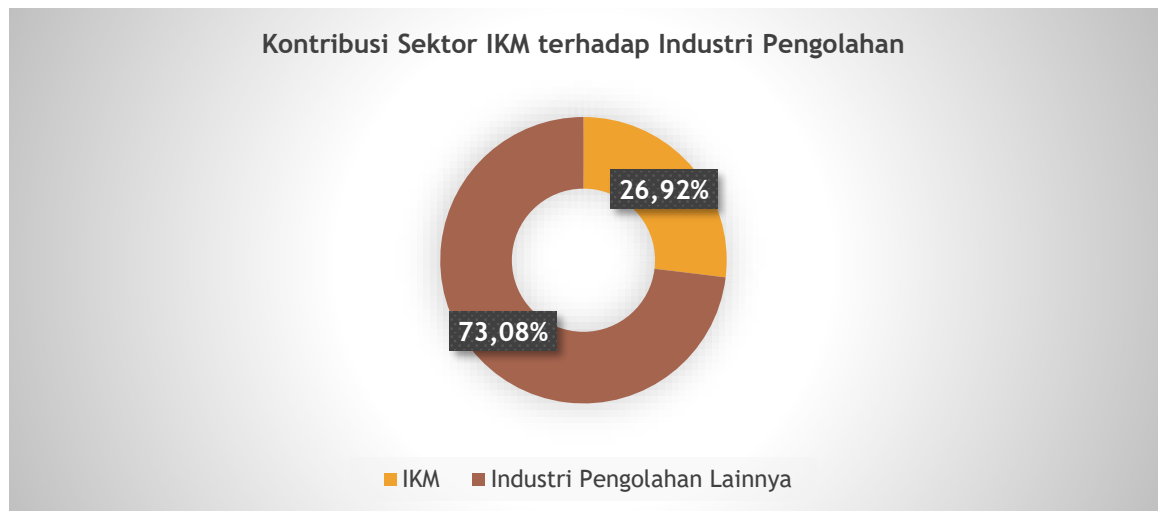
Dua hal penting yang harus diutamakan dalam meningkatkan tingkat keberdayaan konsumen, pertama adalah perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kedua adalah pendidikan konsumen yaitu segala upaya yang bertujuan membekali konsumen dengan informasi dan keterampilan untuk memenuhi tantangan di pasar serta meningkatkan ikatan dengan pemasar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

07 Sasaran Kinerja 5

Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah

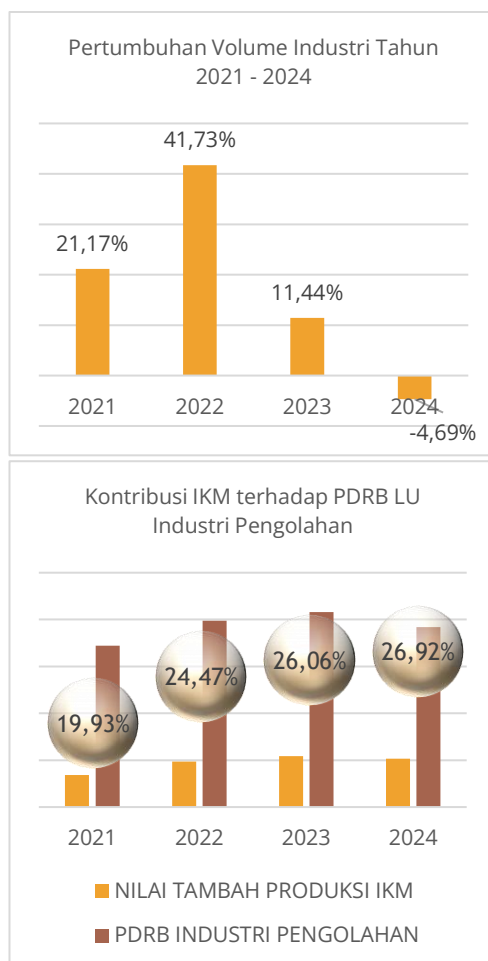
| | | | |
|----------------------------|---|---|------------------------------|
| Indikator Kinerja 7 | : | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | |
| Target Kinerja TA. 2024 | : | 28,50% | Realisasi Kinerja: 94,46% |
| Realisasi Kinerja TA. 2024 | : | 26,92% | |

❖ Realisasi Kinerja Tahun 2024



Sektor industri kecil dan menengah (IKM) ikut merasakan dampak perlambatan ekonomi sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan volume usaha IKM terkontraksi 4,69% dibanding tahun sebelumnya (yoy). Didalam LU industri pengolahan, kontribusi IKM tercatat sebesar 26,92% lebih rendah dibanding target 28,50% yang ditetapkan.

❖ Kinerja Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir



Pertumbuhan volume usaha IKM dalam 2 (dua) tahun terakhir terus mengalami penurunan. Sekalipun secara data, kontribusi IKM terhadap PDRB LU Industri Pengolahan terus mengalami peningkatan, namun penurunan volume usaha IKM perlu menjadi perhatian serius. Penurunan ini bukan sekadar persoalan *temporary* sebagai dampak kondisi ekonomi makro daerah saja, melainkan ada faktor-faktor antara lain:

- Pelaku IKM masih mengandalkan pasar lokal. Secara ukuran pasar, besarnya tidak bertambah. Sementara kompetitor terus bertambah.
- Prilaku konsumen yang semakin aktif berbelanja di *e-commerce*. Bukan saja menyediakan produk yang lebih variatif, bahkan bersaing secara harga.
- Tingkat *awareness* terhadap daya saing produk masih rendah.

D. Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Perindagkop-UKM Bangka Tengah periode 2021 – 2026. Sebanyak 4 dari 7 target kinerja sudah melampaui target kinerja jangka menengah yang ditetapkan, antara lain: (1) volume usaha koperasi; (2) rasio kewirausahaan; (3) kontribusi IKM dan (4) Indeks Keberdayaan Konsumen. Namun untuk melakukan perubahan target renstra, masih perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif mengingat setiap variabel yang digunakan sangat dinamis. Anomali capaian-capaian kinerja yang melebihi target jangka menengah ini tidak terlepas dari dampak Covid-19 tahun 2020. Pandemi mendorong sebagian masyarakat untuk menjadi wirausaha. Membuat orang bergantung dengan koperasi untuk mendapatkan modal atau sekedar mempertahankan ekonomi harian keluarga. Oleh sebab itu, penyesuaian target dilakukan situasional setiap tahun melalui Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dibanding target jangka menengah Tahun 2026

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | 2024 | | | | 2026 | | % Realisasi s.d. Tahun Berjalan |
|---|---|---------|-------|-------|---------|---------|----|---------------------------------|
| | | Target | | Real. | % Real. | Target | | |
| | | Renstra | PK | | | Renstra | PK | |
| 1 Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | 1 Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | 1,07 | 1,90 | 1,94 | 102,11 | 1,15 | | 168,70% |
| 2 Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | 1 Rasio Kewirausahaan | 5,98 | 7,10 | 7,21 | 100,00 | 6,03 | | 119,57% |
| | 2 Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | 32,48 | 32,75 | 32,13 | 100,00 | 32,55 | | 98,71% |
| 3 Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | 19,20 | 25,00 | 26,92 | 100,00 | 20,00 | | 134,60% |
| 4 Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | 1 Koefisien variasi harga antar waktu | 7,25 | 10,00 | 10,16 | 98,43 | 6,75 | | 66,44% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----|----|-------|--------|----|--|---------|
| 5 | Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab | 1 Indeks Keberdayaan Konsumen | 38 | 52 | 46,79 | 100,00 | 40 | | 116,98% |
| | | 2 Indeks Tertib Ukur | 64 | 40 | 69,31 | 173,28 | 72 | | 96,26% |

Kinerja stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dengan indikator koefisien variasi harga antar waktu (KV) menjadi satu-satunya kinerja yang masih jauh dari pemenuhan target. Seperti yang dijelaskan diatas, sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar komoditi harus dipasok dari luar daerah, stabilitas harga sangat sulit diintervensi dan dikontrol. Salah satu hal yang terpenting, dinas yang membidangi pertanian harus terus bekerja keras untuk mendorong produktivitas hasil pertanian ditengah-tengah keterbatasan lahan, sehingga pasokan komoditi dari dalam daerah lebih banyak dan lebih dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan daerah.

E. Analisis Faktor Pendorong/Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.5 Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Penyelenggaraan Program

| No | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----|--|--|---|---|---------------|----------------|
| 1 | Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi | SDM Koperasi sudah cukup memadai, baik dari unsur ASN, Penyuluh dan tenaga pendamping koperasi, baik yang dialokasikan APBD II maupun APBD I. | Pemahaman dan persepsi masyarakat terkait perkoperasian perlu diedukasi dan ditingkatkan. Koperasi masih dipandang sebagai lembaga tepat pinjam meminjam uang saja, bukan sebagai 'korporasi masyarakat' yang membantu mereka untuk meningkatkan perekonomian, produktivitas, dan kesejahteraan mereka. | 39.950.000 | 36.895.000 |
| | | Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi | | | 25.000.000 | 24.899.940 |
| | | Program pendidikan dan latihan perkoperasian | Regenerasi pelaku KUKM mulai terjadi. Banyak anak-anak muda mulai mengambil alih atau mengoperasikan bisnis KUKM yang dijalankan orang tua mereka. Ini menandakan bahwa bisnis KUKM mulai menjadi alternatif yang | Kesadaran para pelaku KUKM untuk meningkatkan pengetahuan dan skill bisnis mereka masih rendah. Mereka sepakat bahwa pengetahuan sangat penting, namun enggan untuk mengambil tindakan berinvestasi untuk | 606.707.000 | 576.521.000 |

| N o | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--------|---|--|---|---|---------------|----------------|
| | | | cukup menjanjikan bagi anak-anak muda, selain keinginan untuk bekerja. | peningkatkan pengetahuan mereka melalui pelatihan-pelatihan, kursus, dan pendidikan lainnya. | | |
| 2 | Rasio Kewirausahaan | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | Bangka Tengah mempunyai tenaga penyuluh lapangan yang ditugaskan di tiap kecamatan untuk menjembatani informasi yang dibutuhkan untuk pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan UMKM, baik secara top down maupun bottom up. | Kualitas SDM para pelaku KUKM di Bangka Tengah masih sangat terbatas. Sehingga dengan angka rasio kewirausahaan yang cukup tinggi, namun belum bisa menggambarkan kualitas kewirausahaan yang diharapkan yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan Kabupaten Bangka Tengah. | 997.030.000 | 955.770.020 |
| 3 | Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | Program pengembangan UMKM | Penyuluh lapangan KUKM yang dimiliki Kabupaten Bangka Tengah menjadi jaminan kemudahan bagi setiap pelaku usaha di Bangka Tengah untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, baik perizinan, permodalan usaha, standarisasi produk, dan bantuan-bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas usaha KUKM. | Daya saing produk KUKM yang masih harus ditingkatkan, aksesibilitas pasar yang masih berfokus pada pasar lokal, dan belum optimal memanfaatkan platform digital untuk pengembangan dan peningkatan skala bisnisnya. | 451.000.000 | 404.499.772 |
| 4 | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | Program perencanaan dan pembangunan industri | | | 748.196.000 | 727.910.587 |
| 5 | Koefisien variasi harga antar waktu | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Bangka Tengah aktif melaksanakan operasi pasar bahan pokok dan pengawasan serta pemantauan harga dan stok bahan pokok dan barang penting untuk menjamin ketersediaan dan meminimalisasi kemungkinan penyimpangan oleh pedagang atau pengepul. | Rantai pasok komoditi masih terlalu panjang. Komoditi yang berasal dari sentra di Kabupaten Bangka Tengah tidak langsung masuk ke pasar-pasar tradisional, melainkan melalui agen-agen atau pengepul yang sebagian besar berada di luar Kabupaten Bangka Tengah. Pasokan komoditi yang diproduksi di dalam daerah juga belum mampu memenuhi kebutuhan daerah. | 396.005.000 | 336.167.948 |

| N o | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--------|----------------------|---|--|--|---------------|----------------|
| | | | | Kondisi ini menyebabkan harga komoditi menjadi sulit di kontrol. | | |
| | | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | SDM Pasar untuk mengelola seluruh pasar dan anggaran untuk operasional sudah cukup memadai. | Anggaran untuk perawatan bangunan pasar yang masih tergolong minim, sehingga pelayanan masih belum dapat diberikan secara optimal. | 1.809.550.000 | 1.787.131.363 |
| 6 | Indeks Tertib Ukur | Program standarisasi dan perlindungan konsumen | SDM Tera dan peralatan pelayanan tera/tera ulang sudah tersedia. OPD juga memperluas cakupan pelayanan tera, tidak saja bagi pedagang dan pelaku usaha, melainkan juga alat UTP yang digunakan di layanan kesehatan. | Sarana mobilisasi yang belum tersedia. | 177.995.000 | 175.890.172 |

F. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi belanja anggaran Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mencapai 91,15%. Hal ini mengindikasikan adanya optimalisasi penggunaan anggaran belanja sesuai rencana yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Jika ditinjau dari rata-rata capaian kinerja Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebesar 97,13% atau kategori "sangat memuaskan", dapat dikatakan bahwa sumber daya yang ada berhasil dikelola secara efektif dan efisien. Sekalipun untuk beberapa target kinerja, baik sasaran ataupun program, masih ada yang perlu diusahakan lebih keras lagi untuk pencapaiannya.

Anggaran Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 tidak hanya ditujukan untuk pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja saja, melainkan juga didorong untuk mampu berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah. Strategi yang dilakukan melalui 2 hal, yaitu: (1) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat; dan (2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Adapun korelasi capaian progam, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran dalam mencapai kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Korelasi Capaian Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Dalam Mencapai Kinerja Sasaran

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | Target | Real | % | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN | Target | Real | ANGGARAN | Realisasi | % |
|--|--|--|--------|------|---------|--|---|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | (5) | (6) | (7) | | (8) | | |
| PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOPERASI, USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DALAM Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT | 1 Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | 1,9 | 1,94 | 102,11% | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase KSP/USP memiliki izin usaha simpan pinjam | 0,00 | 0,00 | - | | 0,00% |
| | | | | | | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi berkualitas | 16,00 | 16,00 | 39.950.000 | 36.895.000 | 92,35% |
| | | | | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase koperasi aktif yang dibina/didampingi menuju berkualitas | 50 | 45 | 39.950.000 | 36.895.000 | 92,35% |
| | | | | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase KSP/USP aktif dengan kategori sehat | 100 | 100 | 25.000.000 | 24.899.940 | 99,60% |
| | | | | | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase KSP/USP aktif yang dilakukan penilaian kesehatannya | 100 | 100 | 25.000.000 | 24.899.940 | 99,60% |
| | | | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi modern | 16 | 16 | 606.707.000 | 576.521.000 | 95,02% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|-------|-------|--|--|---|------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase koperasi yang sudah digitalisasi usaha | 16 | 16 | 606.707.000 | 576.521.000 | 95,02% | |
| | 2 | Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | Rasio Kewirausahaan | 7,1 | 7,21 | 101,55% | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro tangguh | 5,00 | 5,14 | 997.030.000 | 955.770.020 | 95,86% |
| | | | Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | 32,75 | 32,13 | 98,11% | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro dengan kelembagaan yang kuat | 1200 | 1245 | 997.030.000 | 955.770.020 | 95,86% |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro Naik Kelas | 2,00 | 1,75 | 451.000.000 | 404.499.772 | 89,69% |
| | | | | | | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah usaha mikro yang dikembangkan usahanya dengan orientase peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil | 480 | 421 | 451.000.000 | 404.499.772 | 89,69% |
| | 3 | Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab | Indeks Keberdayaan Konsumen | 52 | 46,79 | 90% | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin sesuai ketentuan | 65 | 63 | 25.000.000 | 24.460.000 | 97,84% |
| | | | | | | | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, retail, dan toko modern lainnya memiliki izin sesuai ketentuan | 65 | 63 | 10.000.000 | 9.570.000 | 95,70% |
| | | | | | | | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Gudang yang memiliki TDG | 0 | 0 | - | 0 | 0,00% |
| Pengendalian Fasilitas | | | | | | | Jumlah temuan kasus | max. 20 | 0 | 15.000.000 | 14.890.000 | 99,27% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|-------|--------------------------------|--|---|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | penyalahgunaan bahan berbahaya dalam aktivitas perdagangan | | | | | | |
| | | Indeks Tertib Ukur | 50 | 69,31 | 138,62% | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang | 50 | 69,31 | 177.995.000 | 175.890.172 | 98,82% | |
| | | | | | | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang | 1390 | 1633 | 177.995.000 | 175.890.172 | 98,82% | |
| | 4 | Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Koefisien variasi harga antar waktu | 10 | 10,16 | 98,43% | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase peningkatan transaksi pasar tradisional | 3 | -1,59 | 1.809.550.000 | 1.787.131.363 | 98,76% |
| | | | | | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Sarana distribusi perdagangan yang dikelola dengan baik | 75 | 75 | 1.764.550.000 | 1.743.796.588 | 98,82% | |
| | | | | | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Indeks layanan pasar tradisional dan sarana perdagangan lainnya | 70 | 70 | 45.000.000 | 43.334.775 | 96,30% | |
| | | | | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Indeks harga konsumen (Barang kebutuhan Pokok) | 125 | 114,63 | 396.005.000 | 336.167.948 | 84,89% | |
| | | | | | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting | 10 | 10,16 | 378.195.000 | 319.317.948 | 84,43% | |
| | | | | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida | Persentase ketepatan sasaran | 80 | 80 | 17.810.000 | 16.850.000 | 94,61% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|-------|--|---|---------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi | | | | | | |
| | | | | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase komoditi daerah yang terserap di pasar lokal | 40 | 40 | 52.000.000 | 27.670.000 | 53,21% | |
| | | | | | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase komoditi lokal yang dipasarkan di pasar rakyat, ritel dan marketplace (platform digital) | 40 | 25 | 52.000.000 | 27.670.000 | 53,21% | |
| | 5 | Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | 28,50 | 26,92 | 94,46% | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pertumbuhan nilai produksi Sentra IKM | 10 | 10,07 | 748.196.000 | 727.910.587 | 97,29% |
| | | | | | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase pertumbuhan penjualan produk IKM | 10 | 10,07 | 748.196.000 | 727.910.587 | 97,29% | |
| | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Industri Kecil/Rumah Tangga yang terdata dalam SIINas | 2,80 | 4,09 | 44.060.000 | 38.996.000 | 88,51% | |
| | | | | | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Industri kecil yang terdata dalam SIINas | 30 | 201 | 44.060.000 | 38.996.000 | 88,51% | |



BAB 4 PENUTUP

A. SIMPULAN

- (1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran Renstra Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 berikut analisis kerjanya.
- (2) Capaian kinerja sasaran Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dapat dikategorikan “sangat memuaskan” dengan rata-rata capaian kinerja 97,13%, lebih tinggi 1,03 poin dibanding tahun sebelumnya.
- (3) Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2024 berdampak signifikan terhadap indikator-indikator ekonomi yang diusung Dinas Perindagkop-UKM, antara lain kinerja bisnis koperasi, bisnis UKM dan bisnis IKM. Namun demikian, terkontraksinya beberapa indikator ini harus disikapi secara serius. Faktor pangsa pasar yang tidak bertumbuh, kompetitor yang semakin banyak, dan perilaku berbelanja masyarakat yang mulai lebih aktif menggunakan *marketplace* menjadi ancaman bagi bisnis UKM dan IKM Bangka Tengah.

B. SARAN

- (1) Program-program kegiatan perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terukur. Dinas Perindagkop-UKM harus meningkatkan penggunaan anggaran dan sumber daya secara efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik.
- (2) Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan di lingkungan Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah, hendaknya dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi. Di samping itu langkah penyebarluasan dan implementasi pelaksanaan berbagai kegiatan harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.

- (3) Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Perlu upaya-upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di lingkungan Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.
- (5) Indikator-indikator yang pencapaiannya melibatkan banyak sektor, seperti stabilitas harga komoditi, perlu dilakukan koordinasi yang intensif dan terus-menerus hingga ditemukan langkah-langkah aksi yang paling efektif untuk menjawab tantangan yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan *good governance* Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja OPD kepada *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah ambil bagian dalam membangun Kabupaten Bangka Tengah secara aktif.



LAMPIRAN

Matriks Renstra:

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kerangka Pendanaan, dan Kelompok Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOPERASI, USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DALAM Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat | | | 1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | % | 4,40% | 2,00 | | 4,00 | | 5,00 | | 6,00 | | 7,00 | | 7,00 | |
| | | | 2. Pertumbuhan Volume Usaha Mikro | % | -2,28% | 2,80 | | 5,68 | | 8,64 | | 11,68 | | 14,81 | | 14,81 | |
| | | | 3. Pertumbuhan Volume Usaha Industri Kecil | % | -1,18% | 1,50 | | 3,02 | | 4,57 | | 6,14 | | 7,73 | | 7,73 | |
| | | | 4. Pertumbuhan Nilai Transaksi Pasar Tradisional | % | -17,24% | 3,00 | | 4,54 | | 6,11 | | 7,70 | | 9,32 | | 9,32 | |
| | 1 Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | | Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | % | 1,01% | 1,02% | 250 | 1,05% | 695 | 1,07% | 695 | 1,10% | 695 | 1,15% | 695 | 5,25% | 3.030 |
| | Meningkatnya Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam | 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase KSP/USP memiliki izin usaha simpan pinjam | % | 0,00% | 11% | 40 | 23% | 40 | 35% | 40 | 47% | 40 | 60% | 40 | 60% | 200 |
| | | 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi | Izin | 0 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 200 |
| | | 2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang | Jumlah KSP/USP difasilitasi izin usaha simpan pinjam | Unit | 0 | 6 | 40 | 7 | 40 | 7 | 40 | 7 | 40 | 7 | 40 | 34 | 200 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|---|------|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya koperasi berkualitas | 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi berkualitas | % | 12,93% | 15% | 60 | 16% | 80 | 18% | 80 | 19% | 80 | 20% | 80 | 20% | 380 |
| | | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase koperasi aktif yang dibina/didampingi menuju berkualitas | Unit | 39% | 44% | 60 | 50% | 80 | 56% | 80 | 61% | 80 | 67% | 80 | 67% | 380 |
| | | 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi kekuatan, kesehatan, ketangguhan dan akuntabilitasnya | Unit | 35 | 25 | 30 | 45 | 40 | 50 | 40 | 55 | 40 | 60 | 40 | 60 | 190 |
| | | 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT | Unit | 35 | 40 | 30 | 45 | 40 | 50 | 40 | 55 | 40 | 60 | 40 | 60 | 190 |
| | Meningkatnya KSP/USP Sehat | 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase KSP/USP aktif dengan kategori sehat | % | 49,12% | 70% | 50 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 350 |
| | | 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase KSP/USP aktif yang dilakukan penilaian kesehatannya | % | 49,12% | 70% | 50 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 75 | 100% | 350 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--------|--|---------------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|--|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kabupaten/Kota | Jumlah KSP/USP aktif yang dinilai kesehatannya | Unit | 28 | 40 | 50 | 57 | 75 | 57 | 75 | 57 | 75 | 57 | 75 | 57 | 350 |
| | Modernisasi bisnis koperasi | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi modern | % | n.a | 5% | 100 | 10% | 500 | 15% | 500 | 20% | 500 | 25% | 500 | 25% | 2.100 |
| | | 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang sudah digitalisasi usaha | % | n.a | 20% | 100 | 30% | 500 | 40% | 500 | 50% | 500 | 50% | 500 | 50% | 2.100 |
| | | 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah pengurus/Anggota koperasi yang dilatih digitalisasi usaha dan layanan perkoperasian | Orang | n.a | 50 | 100 | 50 | 500 | 50 | 500 | 50 | 500 | 50 | 500 | 250 | 2.100 |
| | | | UMKM dan pengurus koperasi yang dilatih vocational dan bisnis (DAK Non Fisik) | Orang | | 0 | | 125 | | 125 | | 125 | | 125 | | 500 | |
| | 2 Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | | 1. Rasio Kewirausahaan 2. Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | % % | 5,90% 32,31% | 5,94% 32,37% | 1.665 | 5,96% 32,44% | 1.955 | 5,98% 32,48% | 1.780 | 6,00% 32,52% | 1.780 | 6,03% 32,55% | 1.820 | 6,03% 32,55% | 9.000 |
| | Meningkatnya usaha mikro tangguh | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro tangguh | % | 3,24% | 4,75% | 965 | 7,03% | 1.055 | 9,30% | 980 | 11,58% | 980 | 13,86% | 980 | 13,86% | 4.960 |
| | | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan | Jumlah usaha mikro dengan kelembagaan yang kuat | Unit | 544 | 500 | 965 | 500 | 1.055 | 500 | 980 | 500 | 980 | 500 | 980 | 3044 | 4.960 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|--|------|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Rensta Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Para Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah dokumen pengembangan potensi usaha mikro yang disusun dan diaplikasikan | Dok. | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| | | 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro difasilitasi kemitraan usaha | Unit | 28 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 78 | 125 |
| | | 2.17.07.2.01.03 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi, sertifikasi dan izin usaha | Unit | 2026 | 500 | 20 | 500 | 20 | 500 | 20 | 500 | 20 | 500 | 20 | 4526 | 100 |
| | | 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kelembagaan usahanya | Unit | 4860 | 1296 | 920 | 1296 | 920 | 1296 | 920 | 1296 | 920 | 1296 | 920 | 11340 | 4.600 |
| | | 2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah laporan rakor pemberdayaan usaha mikro yang disusun | Lap. | n.a | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 |
| | Berkembangnya bisnis usaha mikro | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro Naik Kelas | % | 0 | 0,025% | 700 | 0,025% | 900 | 0,025% | 800 | 0,025% | 800 | 0,025% | 840 | 0,11% | 4.040 |
| | | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah usaha mikro yang dikembangkan usahanya dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil | Unit | 140 | 40 | 700 | 40 | 900 | 40 | 800 | 40 | 800 | 40 | 840 | 200 | 4.040 |
| | | 2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pembiayaan usaha | Unit | 935 | 60 | 700 | 80 | 900 | 80 | 800 | 80 | 800 | 80 | 840 | 1315 | 4.040 |
| | | | Jumlah usaha mikro yang diberikan pelatihan penguatan bisnis dengan orientasi scale up | Unit | 140 | 25 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 325 | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--|--|-----------------|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Jumlah usaha mikro yang mendapat pendampingan usaha | Unit | 5 | 10 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 95 | |
| | | | Jumlah partisipasi event promosi produk UKM | Event | 7 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 22 | |
| | 3 | Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Koefisien variasi harga antar waktu | Nilai koefisien | 4,76% | 8,00 | 2.250 | 7,50 | 5.050 | 7,25 | 4.519 | 7,00 | 3.055 | 6,75 | 4.405 | 6,75 | 19.279 |
| | | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase peningkatan transaksi pasar tradisional | % | -17,23% | 1,20% | 1.575 | 1,20% | 4.045 | 1,20% | 3.600 | 1,20% | 2.050 | 1,20% | 3.600 | 6% | 14.870 |
| | | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Sarana distribusi perdagangan yang dikelola dengan baik | Unit | 75% | 75% | 1.500 | 75% | 3.945 | 78% | 3.500 | 78% | 1.950 | 78% | 3.500 | 78% | 14.395 |
| | | 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana perdagangan yang dibangun/direvitalisasi (DAK) | Unit | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 1 | 1.850 | 0 | 0 | 1 | 1.850 | 11 | 5.700 |
| | | | Perawatan gedung pasar (APBD) | Unit | 6 | 0 | 0 | 6 | 145 | | 150 | | 150 | | 150 | | 595 |
| | | 3.30.03.2.01.02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah bulan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Bulan | 12 | 12 | 1.500 | 12 | 1.800 | 12 | 1.500 | 12 | 1.800 | 12 | 1.500 | 60 | 8.100 |
| | | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Indeks layanan pasar tradisional dan sarana perdagangan lainnya | Angka indeks | CC | B | 75 | B | 100 | B | 100 | BB | 100 | BB | 100 | BB | 475 |
| | | 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pengelola sarana perdagangan yang dilatih/dibina | Orang | 0 | 3 | 75 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 23 | 475 |
| | | | Jumlah pedagang yang dilatih melalui "Sekolah Pedagang" | Orang | 20 | 60 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 460 | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--|---|--------------|--|---------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Indeks harga konsumen (bahan kebutuhan pokok) | Nilai Indeks | 137 | <130 | 675 | <125 | 1.005 | <120 | 919 | <115 | 1.005 | <110 | 805 | <110 | 4.409 |
| | | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting | % | 4,76 | 5% - 10% | 595 | 5% - 10% | 905 | 5% - 10% | 819 | 5% - 10% | 905 | 5% - 10% | 705 | 5% - 10% | 3.929 |
| | | 3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Laporan pemantauan harga dan stock barang ditingkat agen/ distributor | Lap. | 20 | 12 | 20 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 80 | 120 |
| | | 3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Laporan pemantauan harga dan stock barang ditingkat pasar rakyat dan eceran lainnya | Lap. | 60 | 48 | 75 | 48 | 80 | 48 | 80 | 48 | 80 | 48 | 80 | 300 | 395 |
| | | 3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Operasi pasar murah yang diselenggarakan | Kali | 12 | 12 | 500 | 24 | 800 | 24 | 714 | 24 | 800 | 24 | 600 | 120 | 3.414 |
| | | | Paket daging murah yang dijual kepada masyarakat | kg | 6500 | 3000 | | 3500 | | 3500 | | 3500 | | 3000 | | 23000 | |
| | | 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketepatan sasaran penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi | % | n.a | 70% | 80 | 75% | 100 | 80% | 100 | 85% | 100 | 90% | 100 | 90% | 480 |
| | | 3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | laporan pengawasan distributor pupuk dan pestisida bersubsidi | Lap. | 0 | 3 | 40 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 240 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|------------------------------|--|---------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi | Lap. | 0 | 12 | 40 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 108 | 240 |
| | 4 Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung jawab | | Indeks Keberdayaan Konsumen Indeks Tertib Ukur | Angka indeks Angka indeks | n.a n.a | 36 55 | 380 | 37 59 | 845 | 38 64 | 805 | 39 68 | 805 | 40 72 | 805 | 40 72 | 3.640 |
| | | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin sesuai ketentuan | % | 53,27% | 62,62% | 40 | 71,96% | 40 | 81,31% | 40 | 90,65% | 40 | 100,00% | 40 | 100,00 % | 200 |
| | | 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, retail, dan toko modern lainnya memiliki izin sesuai ketentuan | % | 29 | 0 | 0 | 33 | 15 | 35 | 15 | 37 | 15 | 39 | 15 | 39 | 60 |
| | | 3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah pengawasan, pembinaan dan edukasi perizinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, retail dan toko modern lainnya yang dilaksanakan | Kali | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 24 | 60 |
| | | 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Gudang yang memiliki TDG | Unit | 57 | 67 | 25 | 77 | 10 | 87 | 10 | 97 | 10 | 107 | 10 | 107 | 65 |
| | | 3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah gudang yang difasilitasi perizinannya | Kali | 0 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 65 |
| | | 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, | Jumlah temuan kasus penyalahgunaan bahan berbahaya dalam aktivitas perdagangan | Kasus | 0 | <20 | 15 | <15 | 15 | <12 | 15 | <10 | 15 | <8 | 15 | <8 | 75 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|--|-------|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah pengawasan peredaran bahan berbahaya yang dilaksanakan | Kali | 0 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 60 | 75 |
| | | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang | % | 14,00% | 14% | 195 | 17% | 330 | 19% | 290 | 20% | 290 | 21% | 290 | 21% | 1.395 |
| | | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang | Unit | 490 | 500 | 195 | 600 | 330 | 650 | 290 | 700 | 290 | 750 | 290 | 750 | 1.395 |
| | | 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Pelayanan sidang tera/tera ulang yang diselenggarakan | Kali | 25 | 20 | 160 | 40 | 250 | 40 | 250 | 40 | 250 | 40 | 250 | 180 | 1.160 |
| | | 3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Peserta penyuluhan/ sosialisasi | Orang | 0 | 40 | 35 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 235 |
| | | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase komoditi daerah yang terserap di pasar lokal | % | n.a | 40% | 145 | 41% | 475 | 41,5% | 475 | 42% | 475 | 42,5% | 425 | 42,5% | 1.995 |
| | | 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase komoditi lokal yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel | | n.a | 40% | 145 | 41% | 475 | 41,5% | 475 | 42% | 475 | 42,5% | 425 | 42,5% | 1.995 |
| | | 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Event promosi produk dalam negeri yang diselenggarakan | Event | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 250 | 8 | 1.150 |
| | | | Promosi (kampanye) penggunaan produk | Kali | 0 | 0 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 48 | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--------|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Rensta Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | dalam negeri melalui radio, koran dan media lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Volume komoditi lokal yang dipasarkan di pasar tradisional dan/atau ritel | ton | 0 | 960 | 85 | 984 | 100 | 996 | 100 | 1008 | 100 | 1020 | 100 | 4968 | 485 |
| | | 3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Pengelolaan aplikasi/marketplace komoditi daerah | Bulan | 0 | 3 | 60 | 12 | 75 | 12 | 75 | 12 | 75 | 12 | 75 | 51 | 360 |
| | 5 Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | % | 17,07% | 18,60 | 1.514 | 18,80 | 1.285 | 19,20 | 1.391 | 19,60 | 1.523 | 20,00 | 1.659 | 20,00 | 7.372 |
| | Meningkatnya produktivitas sentra industri | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pertumbuhan nilai produksi Sentra IKM | % | 0% | 4% | 1.424 | 8% | 1.132 | 14% | 1.231 | 19% | 1.356 | 25% | 1.482 | 25% | 6.626 |
| | | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase pertumbuhan penjualan produk IKM | % | 0 | 3% | 1.424 | 5% | 1.132 | 6% | 1.231 | 8% | 1.356 | 10% | 1.482 | 10% | 6.626 |
| | | 3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Sentra industri yang kembangkan | Sentra | 2 | 1 | 59 | 1 | 65 | 1 | 72 | 1 | 79 | 1 | 87 | 5 | 363 |
| | | 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah SDM Industri (sentra) yang dilatih | IKM | 0 | 30 | 60 | 30 | 66 | 30 | 72 | 30 | 80 | 30 | 88 | 150 | 365 |
| | | 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang disediakan | IKM | 0 | 4 | 60 | 5 | 66 | 6 | 72 | 6 | 80 | 6 | 88 | 27 | 365 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--|---|------|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Peserta Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) | IKM | 544 | 50 | 1.215 | 50 | 841 | 50 | 925 | 50 | 1.017 | 50 | 1.119 | 250 | 5.117 |
| | | | Peserta Pelatihan Auditor Halal Internal (AHI) | IKM | 100 | 30 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 230 | |
| | | | Peserta pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP) | IKM | 0 | 30 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 230 | |
| | | | IKM Kerajinan yang dibina | IKM | 0 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| | | | IKM yang difasilitasi sertifikasi Halal | IKM | 168 | 30 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 230 | |
| | | | IKM yang difasilitasi standar P-IRT | IKM | 544 | 30 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 230 | |
| | | | IKM yang difasilitasi HKI | IKM | 202 | 30 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 230 | |
| | | | Jumlah gedung dekranasda yang dibangun | Unit | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Dokumen RPIK yang di evaluasi | Lap. | 0 | 1 | 30 | 1 | 95 | 1 | 90 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 415 |
| | | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase Industri yang memiliki laporan perkembangan usaha secara faktual di dalam SIINAS | % | 0,58% | 1,22% | 40 | 1,93% | 72 | 3,22% | 80 | 4,50% | 88 | 5,79% | 96 | 5,79% | 376 |
| | | 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Industri difasilitasi perizinan usaha | Unit | 27 | 30 | 40 | 60 | 72 | 60 | 80 | 60 | 88 | 60 | 96 | 270 | 376 |
| | | 3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan yang dilaksanakan | Unit | 19 | 30 | 40 | 60 | 72 | 60 | 80 | 60 | 88 | 60 | 96 | 289 | 376 |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Sat. | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---|-------|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|---------|
| | | | | | | 2022 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta | Target | Rp Juta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Industri Kecil/Rumah Tangga yang terdata dalam SIINas | % | 0 | 1% | 50 | 2,79% | 80 | 4,29% | 80 | 5,79% | 80 | 7,29% | 80 | 7,29% | 370 |
| | | 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Industri kecil yang terdata dalam SIINas | Unit | 0 | 60 | 50 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 340 | 370 |
| | | 3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | Peserta diseminasi | Orang | 0 | 60 | 50 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 460 | 370 |
| | | 3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah industri yang memiliki informasi data usaha secara factual dan real time | Unit | 19 | 30 | 40 | 60 | 72 | 60 | 80 | 60 | 88 | 60 | 96 | 289 | 376 |



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jl. Titian Puspa Utama No. 04 Koba Kode Pos 33181
Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Tengah
Telp/Fax : 0718-7362014 e-mail : diperindagkop@bangkatengahkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.4/1721/DIPERINDAGKOP-UKM/2021**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2022-2026**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah maka perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 285);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
20. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1099).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 – 2026.
- KESATU : IKU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I beserta target capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini merupakan acuan pengukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, penyampaian rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2022-2026.
- KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba

pada tanggal 05 Oktober 2021

KEPALA DINAS,

ELLY IRBYAH, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19651111 199203 2 006

Lampiran I Keputusan

Nomor : 188.4/1721/DIPERINDAGKOP-UKM/2021

Tanggal : 05 Oktober 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BANGKA TENGAH

- Nama OPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | FORMULASI |
|----|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | 1 Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | Data Bidang Koperasi dan UKM | Bidang Koperasi dan UKM | $P_{kop} = \frac{V}{NP_{umkm}} \times 100\%$ <p>Pkop = Proporsi volume usaha koperasi V = Volume usaha koperasi tahun n. NPumkm = Nilai produksi usaha mikro tahun n</p> |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------------|---|
| 2 | Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | 2 | Rasio Kewirausahaan | Data Bidang Koperasi dan UKM | Bidang Koperasi dan UKM | $r = \frac{\Delta ukm}{\Delta v}$ <p> r = Ratio kewirausahaan Δukm = Jumlah UKM – Jumlah UKM pertanian Δv = Jumlah penduduk – Jumlah UKM non pertanian </p> |
| | | 3 | Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | Data Bidang Koperasi dan UKM | Bidang Koperasi dan UKM | $C = \frac{NP}{PDRB} \times 100\%$ <p> C = Kontribusi nilai tambah UKM NP = Nilai produksi UKM tahun n (ADHK) PDRB = PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tengah tahun n </p> |
| 3 | Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | 4 | Koefisien variasi harga antar waktu | Data harga barang pokok Bidang Perdagangan | Bidang Perdagangan | $KV = \frac{s}{X} \times 100\%$ $s = \sqrt{\sum \frac{(Xi - X)^2}{n}}$ <p> KV = Koefisien variasi harga antar waktu S = Simpangan baku X = Rata-rata harga komoditi Xi = Variabel harga komoditi dalam waktu tertentu n = Jumlah data yang digunakan </p> |
| 4 | Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab | 5 | Indeks Keberdayaan Konsumen | Data Bidang Perdagangan | Bidang Perdagangan | $Ikk = \frac{CS + CB + CA}{130}$ <p> IKK = Indeks keberdayaan konsumen CS = Poin Skill konsumen, poin 45 </p> |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| | | | | | | CB = Poin <i>behaviour</i> konsumen, poin 45 CA = Poin <i>awareness</i> konsumen, poin 30 |
| | | 6 | Indeks Tertib Ukur | Data UPT Metrologi | Bidang Perdagangan | $ITU = \frac{UTTP\ sah}{Total\ UTTP}$ ITU = Indeks tertib ukur |
| 5 | Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | 7 | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | Data Industri kecil dan menengah Bidang Perindustrian | Bidang Perindustrian | $Pikm = \frac{NPikm}{PDRB} \times 100\%$ Pikm = Proporsi nilai tambah produksi IKM NPikm = Nilai tambah produksi IKM tahun n (ADHK). PDRB = PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Kabupaten Bangka Tengah tahun n |


 plt. KEPALA DINAS,
 ELLY IRSYAH, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda/ IV.c
 NIP.19651111 199203 2 006

Lampiran II Keputusan

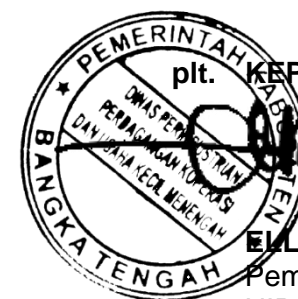
Nomor : 188.4/1721/DIPERINDAGKOP-UKM/2021

Tanggal : 05 Oktober 2021

TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|-----|--|---|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOPERASI, USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT | | 1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| | | | 2. Pertumbuhan Volume Usaha Mikro | 2,80 | 5,68 | 8,64 | 11,68 | 14,81 |
| | | | 3. Pertumbuhan Volume Usaha Industri Kecil | 1,50 | 3,02 | 4,57 | 6,14 | 7,73 |
| | | | 4. Pertumbuhan Nilai Transaksi Pasar Tradisional | 1,50 | 3,02 | 4,57 | 6,14 | 7,73 |
| | | | | | | | | |
| | | 6. Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | 1,02% | 1,05% | 1,07% | 1,10% | 1,15% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 7. Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | 1. Rasio Kewirausahaan | 5,94% | 5,96% | 5,98% | 6,00% | 6,03% |
| | | | 2. Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | 32,37% | 32,44% | 32,48% | 32,52% | 32,55% |
| | | 8. Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Koefisien variasi harga antar waktu | 8,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 6,75 |
| | | 9. Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab | 1. Indeks Keberdayaan Konsumen | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | 2. Indeks Tertib Ukur | 55 | 59 | 64 | 68 | 72 |
| | | 10. Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | 18,6 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 |



plh. KEPALA DINAS,

ELLY IRSYAH, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19651111 199203 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jl. Titian Puspa Utama No. 04 Koba ☎ 0718-7362014 Kode Pos 33181
Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Tengah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERUBAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **IRWANDI, S.STP., M.AP.**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Bangka Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ERA SUSANTO, S.H.**
Jabatan : plt. Bupati Bangka Tengah
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
ERA SUSANTO, S.H.

Koba, 10 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,
IRWANDI, S.STP., M.AP.
NIP. 19841106 200212 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-------------------|---|---|-----------------|
| (1) | | (2) | (3) |
| 1 | Meningkatnya kinerja bisnis Koperasi | 1 Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM | 1,90 % |
| 2 | Berkembangnya usaha mikro yang mampu bersaing di pasar domestik | 1 Rasio Kewirausahaan 2 Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah | 7,10 32,75 % |
| 3 | Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | 1 Koefisien variasi harga antar waktu | 10 |
| 4 | Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab | 1 Indeks Keberdayaan Konsumen 2 Indeks Tertib Ukur | 52 50 |
| 5 | Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah | 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan | 28,50 % |
| 6 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD | 1 Nilai SAKIP OPD | 76 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|--------------------|------------|
| 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp5.244.352.000,00 | APBD |
| 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Rp0,00 | APBD |

| | | | |
|----|--|--------------------|---------------------------------------|
| 3 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Rp39.950.000,00 | APBD |
| 4 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Rp25.000.000,00 | APBD |
| 5 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Rp606.707.000,00 | DAK Non Fisik Bidang Koperasi dan UKM |
| 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Rp997.030.000,00 | APBD |
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Rp439.870.000,00 | APBD |
| 8 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Rp25.000.000,00 | APBD |
| 9 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Rp1.809.550.000,00 | APBD |
| 10 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Rp386.005.000,00 | APBD |
| 11 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Rp177.995.000,00 | APBD |
| 12 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Rp52.000.000,00 | APBD |
| 13 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Rp748.196.000,00 | APBD |
| 14 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Rp44.060.000,00 | APBD |

Koba, 10 Oktober 2024

 **PIHAK KEDUA,**
ERA SUSANTO, S.H.

 **PIHAK PERTAMA**
IRWANDI, S.STP., M.AP.
NIP. 19841106 200212 1 001